REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

2. VISI : Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

3. MISI :
   1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
   2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
   3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
   4. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara Konsisten
   5. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	478.190.725,00
	Total	478.190.725,00

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)		1.182.695.889,00
01.02	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,28	
02	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)		2.466.512.841,00
02.01	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61,3	
03	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)		129.157.328,00
03.01	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,91	
04	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0,00
04.01	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	23,5	
05	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (%)		13.245.071,00
05.01	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	24,6	
	Total		3.791.611.729,00

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2020	2021	2022
068.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.466.512.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.512.841,00	2.589.838.486,00	2.728.498.814,00	2.855.296.944,00
068.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	13.245.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245.071,00	13.907.328,00	14.602.694,00	15.332.823,00
068.01.04	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	129.157.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.157.928,00	135.615.827,00	142.396.614,00	149.516.445,00
068.01.06	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.182.695.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.695.889,00	1.261.135.627,10	1.325.172.641,60	1.390.391.684,70
Total		3.791.611.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.611.729,00	4.000.497.268,10	4.210.670.763,60	4.410.537.896,70

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
	Total	0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK		2.466.512.841,00
01.01	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	
01.02	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	
01.03	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	5	
01.04	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	63% Pengembangan SDM	
01.05	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	
01.06	Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	
	Total		2.466.512.841,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK	158.485.624,00
01.01	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	
01.02	Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan	
01.03	Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	
01.04	Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01.05	Persentase pelayanan kerumahtanggan dan protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar	
02	Dukungan Manajemen pengelolaan Program KKBPK di Provinsi	2.308.027.217,00
02.01	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	
02.02	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	
02.03	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
02.04	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	
	Total	2.466.512.841,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2020	2021	2022
3300	Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	6.396.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396.970,00	6.716.818,00	7.052.660,00	7.405.293,00
3301	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.975.000,00	10.473.750,00	10.997.437,00
3302	Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00	10.799.250,00	11.339.212,00	11.906.173,00
3303	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	13.491.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491.640,00	14.166.223,00	14.874.533,00	15.618.259,00
3304	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan	118.812.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812.014,00	124.752.615,00	130.990.246,00	137.539.756,00
5297	Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi	2.308.027.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.027.217,00	2.423.428.580,00	2.553.768.413,00	2.671.830.026,00
	Total	2.466.512.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.512.841,00	2.589.838.486,00	2.728.498.814,00	2.855.296.944,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (%)
3. PROGRAM : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
	Total	0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK		13.245.071,00
01.01	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)	
01.02	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 prov	
	Total		13.245.071,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran Program KKBPK di lingkungan BKKBN	10.317.000,00
01.01	Persentase penurunan temuan eksternal	
01.02	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	
01.03	Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Intergritas Wilayah	
02	Akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	2.928.071,00
02.01	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	
02.02	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	
	Total	13.245.071,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
3306	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah III	3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00	3.960.601,00	4.158.630,00	4.366.562,00
3307	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah I	3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00	3.159.452,00	3.317.423,00	3.483.293,00
3308	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah II	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00	3.712.801,00	3.898.441,00	4.093.362,00
5298	Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi	2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00	3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00
Total		13.245.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245.071,00	13.907.328,00	14.602.694,00	15.332.823,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrijal, SP, MA
NIP. 19601111 198803 1001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)
3. PROGRAM : Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
	Total	0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK		129.157.928,00
01.01	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	100	
01.02	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	10	
01.03	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3	
01.04	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,4	
01.05	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34	
	Total		129.157.928,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan	44.891.941,00
01.01	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK	
01.02	Persentase tenaga program nasional yang terlatih	
01.03	Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional	
01.04	Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi	
01.05	Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang Terakreditasi	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
02	Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Program KKBPK di provinsi	84.265.987,00
02.01	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	
02.02	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	
02.03	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	
02.04	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	
	Total	129.157.928,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2020	2021	2022
3309	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	22.881.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881.960,00	24.026.058,00	25.227.361,00	26.488.729,00
3310	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00
3311	Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00
3312	Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	9.769.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769.981,00	10.258.480,00	10.771.404,00	11.309.974,00
5299	Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi	84.265.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.265.987,00	88.479.289,00	92.903.249,00	97.548.412,00
	Total	129.157.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.157.928,00	135.615.827,00	142.396.614,00	149.516.445,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
3. PROGRAM : Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	478.190.725,00
01.02	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	478.190.725,00
	Total	478.190.725,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah		1.182.695.889,00
01.01	Jumlah peserta KB baru	7,33	
01.02	ASFR 15-19 Tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun	
01.03	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	70	
01.04	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	50	
01.05	Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	52	
01.06	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	50	
01.07	Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	
	Total		1.182.695.889,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Perencanaan Pembangunan	12.168.840,00
01.01	Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	
02	Peningkatan kuantitas dan kualitas Pelayanan KB dan KR	45.265.931,00
02.01	Jumlah PA Tambahan	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
02.02	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)	
03	Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas	19.176.736,00
03.01	Persentase Keluarga Pra- Sejahtera (Pra-KS)	
03.02	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama	
03.03	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	
04	Penghayatan Norma Keluarga Kecil	114.194.400,00
04.01	Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal	
04.02	Persentase remaja yang mengadopsi norma usia Kawin ideal	
04.03	Persentase potential demand	
04.04	Persentase pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	
05	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi	991.889.982,00
05.01	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	
05.02	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
05.03	Jumlah Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	
05.04	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	
05.05	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	
05.06	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	
05.07	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	
05.08	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	
05.09	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	
05.10	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	
05.11	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	
05.12	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	
05.13	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	
05.14	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	
05.15	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	
05.16	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	
05.17	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	
05.18	Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	
05.19	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	
05.20	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	
05.21	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	
	Total	1.182.695.889,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL			
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						2020	2021	2022
3313	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	80.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923.400,00	84.969.567,00	89.218.044,00	93.678.943,00
3314	Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK	6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00	7.231.348,00	7.592.916,00	7.972.563,00
3315	Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja	4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00	4.277.699,00	4.491.585,00	4.716.165,00
3316	Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	34.322.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322.003,00	36.038.104,00	37.840.009,00	39.732.009,00
3317	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	3.726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.700,00	3.913.035,00	4.108.686,00	4.314.120,00
3318	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,00
3319	Pembinaan Ketahanan Remaja	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.562.500,00	6.890.625,00	7.235.156,00
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	3.202.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.520,00	3.362.645,00	3.530.778,00	3.707.315,00
3322	Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus	4.043.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.208,00	4.245.369,00	4.457.638,00	4.680.518,00
3323	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5.282.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.436,00	5.546.559,00	5.823.886,00	6.115.080,00
3324	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	3.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.600,00	4.113.480,00	4.319.155,00	4.535.112,00
3325	Kerjasama Pendidikan kependudukan	2.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.440,00	2.928.913,00	3.075.357,00	3.229.126,00
3326	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	2.779.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.320,00	2.918.286,00	3.064.201,00	3.217.411,00
3327	Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR	3.698.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.200,00	3.883.110,10	4.077.265,60	4.281.128,70
3328	Analisis Dampak Kependudukan	2.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00	3.091.200,00	3.245.760,00	3.408.048,00
3329	Perencanaan Pengendalian Penduduk	3.656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.080,00	3.838.884,00	4.030.829,00	4.232.370,00
3330	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK	17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00	18.333.001,00	19.249.651,00	20.212.133,00
3331	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	991.889.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.889.982,00	1.060.789.427,00	1.114.809.131,00	1.169.510.006,00
Total		1.182.695.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.695.889,00	1.261.135.627,10	1.325.172.641,60	1.390.391.684,70

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nopnjal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2 PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3300 - Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Hukum, Organisasi dan Humas
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK		6.396.970,00
01.01	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	1	
	Total		6.396.970,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK*											6.396.970,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.232.375,00
01.953.001	Tanpa Suboutput											1.232.375,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											1.232.375,00
		Pusat	Pusat									1.232.375,00
01.957	Layanan Hukum								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	869.549,00
01.957.001	Tanpa suboutput											869.549,00
	051 - Koordinasi penyusunan produk hukum											869.549,00
		Pusat	Pusat									869.549,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.307.303,00
01.958.001	Tanpa SubOutput											2.307.303,00
	051 - Hubungan masyarakat											2.307.303,00
		Pusat	Pusat									2.307.303,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.960	Layanan Manajemen Organisasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.987.743,00
01.960.001	Tanpa suboutput											1.987.743,00
	051 - Pengelolaan kelembagaan											1.987.743,00
		Pusat	Pusat									1.987.743,00
Total												6.396.970,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK				6.396.970,00				6.716.818,00	7.052.660,00	7.405.293,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.232.375,00				1.293.994,00	1.358.693,00	1.426.628,00
01.953.001	Tanpa Suboutput				1.232.375,00				1.293.994,00	1.358.693,00	1.426.628,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	dokumen	NaN	1.232.375,00	0,00	0,00	0,00	1.293.994,00	1.358.693,00	1.426.628,00
01.957	Layanan Hukum	1	Layanan		869.549,00				913.026,00	958.678,00	1.006.612,00
01.957.001	Tanpa suboutput				869.549,00				913.026,00	958.678,00	1.006.612,00
01.957.001.051	Koordinasi penyusunan produk hukum	0,00	dokumen	NaN	869.549,00	0,00	0,00	0,00	913.026,00	958.678,00	1.006.612,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		2.307.303,00				2.422.668,00	2.543.802,00	2.670.992,00
01.958.001	Tanpa SubOutput				2.307.303,00				2.422.668,00	2.543.802,00	2.670.992,00
01.958.001.051	Hubungan masyarakat	0,00	dokumen	NaN	2.307.303,00	0,00	0,00	0,00	2.422.668,00	2.543.802,00	2.670.992,00
01.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan		1.987.743,00				2.087.130,00	2.191.487,00	2.301.061,00
01.960.001	Tanpa suboutput				1.987.743,00				2.087.130,00	2.191.487,00	2.301.061,00
01.960.001.051	Pengelolaan kelembagaan	0,00	dokumen	NaN	1.987.743,00	0,00	0,00	0,00	2.087.130,00	2.191.487,00	2.301.061,00
Total					6.396.970,00	-	-	-	6.716.818,00	7.052.660,00	7.405.293,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK		6.396.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396.970,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.232.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.375,00
01.953.001	Tanpa Suboutput		1.232.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.375,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	1.232.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.375,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.957	Layanan Hukum		869.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.549,00
01.957.001	Tanpa suboutput		869.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.549,00
01.957.001.051	Koordinasi penyusunan produk hukum	Pendukung	869.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.549,00
01.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		2.307.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.303,00
01.958.001	Tanpa SubOutput		2.307.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.303,00
01.958.001.051	Hubungan masyarakat	Pendukung	2.307.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.303,00
01.960	Layanan Manajemen Organisasi		1.987.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.743,00
01.960.001	Tanpa suboutput		1.987.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.743,00
01.960.001.051	Pengelolaan kelembagaan	Pendukung	1.987.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987.743,00
Total			6.396.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396.970,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nugraha, SP, MA
NIP. 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3301 - Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP		9.500.000,00
02.01	Persentase Laporan Keuangan dan BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100%	
	Total		9.500.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
02	*Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP*											9.500.000,00
02.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.200.000,00
02.951.001	Tanpa suboutput											1.200.000,00
	052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi											1.200.000,00
		Pusat	Pusat									1.200.000,00
02.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.263.736,00
02.953.001	Tanpa suboutput											2.263.736,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											2.263.736,00
		Pusat	Pusat									2.263.736,00
02.955	Layanan Manajemen Keuangan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.370.417,00
02.955.001	Tanpa suboutput											2.370.417,00
	052 - Pengelolaan perbendaharaan											1.254.673,00
		Pusat	Pusat									1.254.673,00
	053 - Penyusunan laporan keuangan											1.115.744,00
		Pusat	Pusat									1.115.744,00
02.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.566.423,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
02.956.001	Tanpa suboutput											2.566.423,00
	051 - Penatausahaan BMN											2.566.423,00
		Pusat	Pusat									2.566.423,00
02.962	Layanan Umum								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.099.424,00
02.962.001	Tanpa suboutput											1.099.424,00
	055 - Pengelolaan sarana dan prasarana											1.099.424,00
		Pusat	Pusat									1.099.424,00
Total												9.500.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP				9.500.000,00				9.975.000,00	10.473.750,00	10.997.437,00
02.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		1.200.000,00				1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
02.951.001	Tanpa suboutput				1.200.000,00				1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
02.951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	unit	NaN	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.323.000,00	1.389.150,00
02.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		2.263.736,00				2.376.923,00	2.495.769,00	2.620.557,00
02.953.001	Tanpa suboutput				2.263.736,00				2.376.923,00	2.495.769,00	2.620.557,00
02.9[illegible].001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	dokumen	NaN	2.263.736,00	0,00	0,00	0,00	2.376.923,00	2.495.769,00	2.620.557,00
02.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		2.370.417,00				2.488.938,00	2.613.385,00	2.744.054,00
02.955.001	Tanpa suboutput				2.370.417,00				2.488.938,00	2.613.385,00	2.744.054,00
02.955.001.052	Pengelolaan perbendaharaan	0,00	laporan	NaN	1.254.673,00	0,00	0,00	0,00	1.317.407,00	1.383.277,00	1.452.441,00
02.955.001.053	Penyusunan laporan keuangan	0,00	laporan	NaN	1.115.744,00	0,00	0,00	0,00	1.171.531,00	1.230.108,00	1.291.613,00
02.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1	Layanan		2.566.423,00				2.694.744,00	2.829.481,00	2.970.955,00
02.956.001	Tanpa suboutput				2.566.423,00				2.694.744,00	2.829.481,00	2.970.955,00
02.956.001.051	Penatausahaan BMN	0,00	laporan	NaN	2.566.423,00	0,00	0,00	0,00	2.694.744,00	2.829.481,00	2.970.955,00
02.962	Layanan Umum	1	Layanan		1.099.424,00				1.154.395,00	1.212.115,00	1.272.721,00
02.962.001	Tanpa suboutput				1.099.424,00				1.154.395,00	1.212.115,00	1.272.721,00
02.962.001.055	Pengelolaan sarana dan prasarana	0,00	laporan	NaN	1.099.424,00	0,00	0,00	0,00	1.154.395,00	1.212.115,00	1.272.721,00
Total					9.500.000,00	-	-	-	9.975.000,00	10.473.750,00	10.997.437,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
02.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
02.951.001	Tanpa suboutput		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
02.951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
02.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.263.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.736,00
02.953.001	Tanpa suboutput		2.263.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.736,00
02.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	2.263.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.736,00
02.955	Layanan Manajemen Keuangan		2.370.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.417,00
02.955.001	Tanpa suboutput		2.370.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.417,00
02.955.001.052	Pengelolaan perbendaharaan	Pendukung	1.254.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.673,00
02.955.001.053	Penyusunan laporan keuangan	Pendukung	1.115.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.744,00
02.956	Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)		2.566.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.423,00
02.956.001	Tanpa suboutput		2.566.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.423,00
02.956.001.051	Penatausahaan BMN	Pendukung	2.566.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.423,00
02.962	Layanan Umum		1.099.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.424,00
02.962.001	Tanpa suboutput		1.099.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.424,00
02.962.001.055	Pengelolaan sarana dan prasarana	Pendukung	1.099.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.424,00
Total			9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nurial, SE, MA
NIP. 19601 11 1985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3302 - Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Perencanaan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
03	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja		10.285.000,00
03.01	Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	
	Total		10.285.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
03	*Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja*											10.285.000,00
03.952	Layanan Perencanaan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	7.557.718,00
03.952.001	Tanpa Suboutput											7.557.718,00
	051 - Penyusunan rencana kerja											7.557.718,00
		Pusat	Pusat									7.557.718,00
03.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.727.282,00
03.953.001	Tanpa suboutput											2.727.282,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											2.727.282,00
		Pusat	Pusat									2.727.282,00
	Total											10.285.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
03	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja				10.285.000,00				10.799.250,00	11.339.212,00	11.906.173,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
03.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan		7.557.718,00				7.935.604,00	8.332.384,00	8.749.003,00
03.952.001	Tanpa Suboutput				7.557.718,00				7.935.604,00	8.332.384,00	8.749.003,00
03.952.001.051	Penyusunan rencana kerja	0,00	dokumen	NaN	7.557.718,00	0,00	0,00	0,00	7.935.604,00	8.332.384,00	8.749.003,00
03.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		2.727.282,00				2.863.646,00	3.006.828,00	3.157.170,00
03.953.001	Tanpa suboutput				2.727.282,00				2.863.646,00	3.006.828,00	3.157.170,00
03.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	unit kerja eselon II	NaN	2.727.282,00	0,00	0,00	0,00	2.863.646,00	3.006.828,00	3.157.170,00
Total					10.285.000,00	-	-	-	10.799.250,00	11.339.212,00	11.906.173,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
03	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja		10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00
03.952	Layanan Perencanaan		7.557.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557.718,00
03.952.001	Tanpa Suboutput		7.557.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557.718,00
03.952.001.051	Penyusunan rencana kerja	Pendukung	7.557.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557.718,00
03.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		2.727.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.282,00
03.953.001	Tanpa suboutput		2.727.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.282,00
03.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	2.727.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.282,00
Total			10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011[illegible]1985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3303 - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Kepegawaian
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
04	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten		13.491.640,00
04.01	Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal	100	
	Total		13.491.640,00

RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
04	*Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten*											13.491.640,00
04.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.923.379,00
04.953.001	Tanpa suboutput											1.923.379,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											1.923.379,00
		Pusat	Pusat									1.923.379,00
04.954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	11.568.261,00
04.954.001	Tanpa Suboutput											11.568.261,00
	052 - Administrasi kepegawaian											1.803.123,00
		Pusat	Pusat									1.803.123,00
	053 - Pembinaan kepegawaian											619.498,00
		Pusat	Pusat									619.498,00
	054 - Pengembangan pegawai											1.742.530,00
		Pusat	Pusat									1.742.530,00
	056 - Penempatan/mutasi pegawai											7.403.110,00
		Pusat	Pusat									7.403.110,00
	Total											13.491.640,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
04	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten				13.491.640,00				14.166.223,00	14.874.533,00	15.618.259,00
04.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.923.379,00				2.019.548,00	2.120.525,00	2.226.552,00
04.953.001	Tanpa suboutput				1.923.379,00				2.019.548,00	2.120.525,00	2.226.552,00
04.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	dokumen	NaN	1.923.379,00	0,00	0,00	0,00	2.019.548,00	2.120.525,00	2.226.552,00
04.954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Layanan		11.568.261,00				12.146.675,00	12.754.008,00	13.391.707,00
04.954.001	Tanpa Suboutput				11.568.261,00				12.146.675,00	12.754.008,00	13.391.707,00
04.954.001.052	Administrasi kepegawaian	0,00	dokumen	NaN	1.803.123,00	0,00	0,00	0,00	1.893.279,00	1.987.943,00	2.087.340,00
04.954.001.053	Pembinaan kepegawaian	0,00	dokumen	NaN	619.498,00	0,00	0,00	0,00	650.473,00	682.997,00	717.146,00
04.954.001.054	Pengembangan pegawai	0,00	dokumen	NaN	1.742.530,00	0,00	0,00	0,00	1.829.657,00	1.921.139,00	2.017.196,00
04.954.001.056	Penempatan/mutasi pegawai	0,00	dokumen	NaN	7.403.110,00	0,00	0,00	0,00	7.773.266,00	8.161.929,00	8.570.025,00
Total					13.491.640,00	-	-	-	14.166.223,00	14.874.533,00	15.618.259,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
04	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten		13.491.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491.640,00
04.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.923.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.379,00
04.953.001	Tanpa suboutput		1.923.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.379,00
04.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	1.923.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.379,00
04.954	Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)		11.568.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568.261,00
04.954.001	Tanpa Suboutput		11.568.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568.261,00
04.954.001.052	Administrasi kepegawaian	Pendukung	1.803.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.123,00
04.954.001.053	Pembinaan kepegawaian	Pendukung	619.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.498,00
04.954.001.054	Pengembangan pegawai	Pendukung	1.742.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.530,00
04.954.001.056	Penempatan/mutasi pegawai	Pendukung	7.403.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.110,00
Total			13.491.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.491.640,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nurrija, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3304 - Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Umum
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran		118.812.014,00
01.01	Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	skala 4 (1-4)	
01.02	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	skala 4 (1-4)	
01.03	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan	skala 4 (1-4)	
	Total		118.812.014,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran*											118.812.014,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.528.600,00
01.951.001	Tanpa suboutput											3.528.600,00
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran											2.433.030,00
		Pusat	Pusat									2.433.030,00
	054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan											1.095.570,00
		Pusat	Pusat									1.095.570,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.795.459,00
01.953.001	Tanpa suboutput											3.795.459,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											3.795.459,00
		Pusat	Pusat									3.795.459,00
01.959	Layanan Protokoler								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	358.669,00
01.959.001	Tanpa Suboutput											358.669,00
	052 - Pelaksanaan keprotokoleran											358.669,00
		Pusat	Pusat									358.669,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.962	Layanan Umum								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.843.702,00
01.962.001	Tanpa suboutput											4.843.702,00
	051 - Layanan umum rumah tangga											1.083.928,00
		Pusat	Pusat									1.083.928,00
	052 - Pengelolaan arsip dan persuratan											673.155,00
		Pusat	Pusat									673.155,00
	053 - Pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan											478.258,00
		Pusat	Pusat									478.258,00
	055 - Pengelolaan sarana dan prasarana											2.608.361,00
		Pusat	Pusat									2.608.361,00
01.994	Layanan Perkantoran								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	106.285.584,00
01.994.001	Tanpa Suboutput											106.285.584,00
	001 - Gaji dan Tunjangan											86.675.584,00
		Pusat	Pusat									86.675.584,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											19.610.000,00
		Pusat	Pusat									19.610.000,00
				Total								118.812.014,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran				118.812.014,00				124.752.615,00	130.990.246,00	137.539.756,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		3.528.600,00				3.705.031,00	3.890.282,00	4.084.795,00
01.951.001	Tanpa suboutput				3.528.600,00				3.705.031,00	3.890.282,00	4.084.795,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0,00	unit	NaN	2.433.030,00	0,00	0,00	0,00	2.554.682,00	2.682.416,00	2.816.536,00
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	0,00	unit	NaN	1.095.570,00	0,00	0,00	0,00	1.150.349,00	1.207.866,00	1.268.259,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		3.795.459,00				3.985.232,00	4.184.494,00	4.393.718,00
01.953.001	Tanpa suboutput				3.795.459,00				3.985.232,00	4.184.494,00	4.393.718,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	pusat dan provinsi	NaN	3.795.459,00	0,00	0,00	0,00	3.985.232,00	4.184.494,00	4.393.718,00
01.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		358.669,00				376.602,00	395.433,00	415.204,00
01.959.001	Tanpa Suboutput				358.669,00				376.602,00	395.433,00	415.204,00
01.959.001.052	Pelaksanaan keprotokoleran	0,00	layanan	NaN	358.669,00	0,00	0,00	0,00	376.602,00	395.433,00	415.204,00
01.962	Layanan Umum	1	Layanan		4.843.702,00				5.085.887,00	5.340.181,00	5.607.190,00
01.962.001	Tanpa suboutput				4.843.702,00				5.085.887,00	5.340.181,00	5.607.190,00
01.962.001.051	Layanan umum rumah tangga	0,00	layanan	NaN	1.083.928,00	0,00	0,00	0,00	1.138.124,00	1.195.031,00	1.254.782,00
01.962.001.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	0,00	layanan	NaN	673.155,00	0,00	0,00	0,00	706.813,00	742.153,00	779.261,00
01.962.001.053	Pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan	0,00	layanan	NaN	478.258,00	0,00	0,00	0,00	502.171,00	527.279,00	553.643,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01.962.001.055	Pengelolaan sarana dan prasarana	0,00	layanan	NaN	2.608.361,00	0,00	0,00	0,00	2.738.779,00	2.875.718,00	3.019.504,00	
01.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		106.285.584,00				111.599.863,00	117.179.856,00	123.038.849,00	
01.994.001	Tanpa Suboutput				106.285.584,00				111.599.863,00	117.179.856,00	123.038.849,00	
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	13,00	Layanan	6.667.352,62	86.675.584,00	13,00	13,00	13,00	91.009.363,00	95.559.831,00	100.337.823,00	
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,00	Layanan	1.634.166,67	19.610.000,00	12,00	12,00	12,00	20.590.500,00	21.620.025,00	22.701.026,00	
Total					118.812.014,00	-	-	-	124.752.615,00	130.990.246,00	137.539.756,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran		118.812.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812.014,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3.528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.600,00
01.951.001	Tanpa suboutput		3.528.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528.600,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	2.433.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.030,00
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Pendukung	1.095.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.570,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		3.795.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.459,00
01.953.001	Tanpa suboutput		3.795.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.459,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	3.795.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.459,00
01.959	Layanan Protokoler		358.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.669,00
01.959.001	Tanpa Suboutput		358.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.669,00
01.959.001.052	Pelaksanaan keprotokoleran	Pendukung	358.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.669,00
01.962	Layanan Umum		4.843.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.702,00
01.962.001	Tanpa suboutput		4.843.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.702,00
01.962.001.051	Layanan umum rumah tangga	Pendukung	1.083.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.928,00
01.962.001.052	Pengelolaan arsip dan persuratan	Pendukung	673.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.155,00
01.962.001.053	Pengelolaan keamanan dan ketertiban lingkungan	Pendukung	478.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.258,00
01.962.001.055	Pengelolaan sarana dan prasarana	Pendukung	2.608.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.361,00
01.994	Layanan Perkantoran		106.285.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.285.584,00
01.994.001	Tanpa Suboutput		106.285.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.285.584,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	86.675.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.675.584,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	19.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.610.000,00
Total			118.812.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.812.014,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nelfrida, SP, MA
NIP. 196011 11985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan program KKBPK
4. KEGIATAN : 5297 - Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Provinsi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi		2.308.027.217,00
01.01	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan untuk 34 Prov	
01.02	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100	
01.03	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	
01.04	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12	
	Total		2.308.027.217,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi*											2.308.027.217,0
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	104.481.222,00
01.950.001	Tanpa suboutput											104.481.222,00
	051 - Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran											22.533.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									787.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									878.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									711.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									664.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									612.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									744.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									590.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									700.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									510.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									503.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									210.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									971.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.015.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									450.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									996.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									530.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									568.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									590.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									854.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									678.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									683.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									643.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									690.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									730.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									686.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									898.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									794.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									484.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									496.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									612.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									600.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									705.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									950.000,00
	052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											23.134.500,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									742.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									780.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									880.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									620.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									580.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									758.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									550.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									690.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									523.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									555.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									312.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.182.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.207.500,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									490.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.274.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									596.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									540.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									580.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									678.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									656.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									674.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									638.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									840.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									710.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									638.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									924.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									758.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									528.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									540.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									620.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									590.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									664.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									817.000,00
	054 - Pengelolaan keuangan											22.978.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									698.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									855.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									684.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									620.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									661.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									705.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									580.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									655.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									512.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									1.395.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									293.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									928.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									925.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									480.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									972.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									608.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									566.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									660.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									772.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									634.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									644.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									638.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									960.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									730.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									638.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									804.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									682.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									496.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									496.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									615.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									590.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									628.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									854.000,00
	057 - Pengelolaan kepegawaian											19.705.786,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									702.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									786.088,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									676.848,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									577.208,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									580.740,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									638.824,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									538.831,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									630.154,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									484.417,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									486.640,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									172.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									781.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									750.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									478.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									849.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									519.436,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									533.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									546.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									689.800,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									658.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									593.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									637.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									722.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									583.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									574.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									646.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									608.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									479.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									479.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									530.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									516.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									553.400,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									705.900,00
	061 - Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi											16.129.936,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									555.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									535.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									494.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									452.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									436.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									502.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									420.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									480.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									402.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									392.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									218.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									622.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									695.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									470.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									732.936,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									508.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									414.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									420.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									512.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									474.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									469.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									458.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									590.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									480.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									458.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									584.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									502.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									486.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									486.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									446.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									425.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									458.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									554.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	32.650.900,00
01.951.001	Tanpa suboutput											32.650.900,00
	051 - Pengadaan kendaraan bermotor											7.897.183,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									485.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									482.074,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									490.700,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									471.615,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									515.263,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									0,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									110.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.634.936,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									462.063,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									302.400,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									519.889,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									300.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									486.306,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									362.289,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									846.016,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									428.632,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									0,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00
	052 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi											3.158.325,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									21.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									199.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									123.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									319.745,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									138.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									55.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									681.161,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									361.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									24.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.103.419,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									72.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									60.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									0,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran											5.187.738,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									8.763,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									150.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									750.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									91.994,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									774.160,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									150.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									79.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									175.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									150.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									100.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									150.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									12.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									249.625,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									301.560,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									114.020,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									150.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									155.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									92.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									178.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									56.616,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									150.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									850.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									150.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									150.000,00
	054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan											16.407.654,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									2.725.173,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									340.840,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									0,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.562.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.060.838,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									2.210.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									3.258.803,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									0,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									0,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00

DE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									0,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									150.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									4.100.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00
01.994	Layanan Perkantoran								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.170.895.095,00
01.994.001	tanpa suboutput											2.170.895.095,00
	001 - Gaji dan Tunjangan											2.090.864.402,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									77.042.657,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									120.661.634,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									54.151.999,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									34.548.707,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									53.084.431,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									69.608.553,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									47.041.143,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									84.271.406,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									12.194.332,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									7.225.026,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									180.609.701,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									245.406.989,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									45.308.020,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									319.476.999,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									18.067.328,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									40.793.697,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									60.111.126,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									71.846.201,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									36.600.405,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									28.498.396,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									55.473.956,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									36.326.708,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									27.758.231,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									46.641.691,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									169.445.474,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									39.953.627,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									21.072.153,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									26.720.746,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									19.640.976,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									20.870.152,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									7.334.164,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									13.077.774,00
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											80.030.693,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									3.362.196,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									2.665.092,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									2.560.215,0[illegible]
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									2.741.523,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.875.418,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									2.256.408,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									1.843.091,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									2.142.892,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									1.782.665,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									1.412.745,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									6.756.138,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									6.095.161,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									2.728.482,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									5.680.684,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.578.928,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									2.140.029,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									2.132.465,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									2.062.999,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									2.738.758,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									2.320.955,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									2.298.123,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									2.212.266,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									2.328.155,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.933.934,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									2.782.071,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.928.639,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									1.246.539,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									1.389.614,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									1.990.670,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.785.925,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									1.228.190,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									2.029.723,00
	Total											2.308.027.217,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi				2.308.027.217,00				2.423.428.580,00	2.553.768.413,00	2.671.830.026,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan		104.481.222,00				109.705.283,00	124.358.954,00	120.950.090,00
01.950.001	Tanpa suboutput				104.481.222,00				109.705.283,00	124.358.954,00	120.950.090,00
01.950.001.051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	0,00	dokumen	NaN	22.533.000,00	0,00	0,00	0,00	23.659.650,00	24.842.636,00	26.084.766,00
01.950.001.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	0,00	dokumen	NaN	23.134.500,00	0,00	0,00	0,00	24.291.225,00	34.674.178,00	26.781.082,00
01.950.001.054	Pengelolaan keuangan	0,00	dokumen	NaN	22.978.000,00	0,00	0,00	0,00	24.126.900,00	25.333.249,00	26.599.911,00
01.950.001.057	Pengelolaan kepegawaian	0,00	dokumen	NaN	19.705.786,00	0,00	0,00	0,00	20.691.075,00	21.725.634,00	22.811.911,00
01.950.001.061	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	0,00	dokumen	NaN	16.129.936,00	0,00	0,00	0,00	16.936.433,00	17.783.257,00	18.672.420,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		32.650.900,00				34.283.445,00	35.997.621,00	37.797.501,00
01.951.001	Tanpa suboutput				32.650.900,00				34.283.445,00	35.997.621,00	37.797.501,00
01.951.001.051	Pengadaan kendaraan bermotor	0,00	unit	NaN	7.897.183,00	0,00	0,00	0,00	8.292.042,00	8.706.646,00	9.141.978,00
01.951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	0,00	unit	NaN	3.158.325,00	0,00	0,00	0,00	3.316.241,00	3.482.055,00	3.656.155,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0,00	unit	NaN	5.187.738,00	0,00	0,00	0,00	5.447.125,00	5.719.482,00	6.005.457,00
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	0,00	m2	NaN	16.407.654,00	0,00	0,00	0,00	17.228.037,00	18.089.438,00	18.993.911,00
01.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		2.170.895.095,00				2.279.439.852,00	2.393.411.838,00	2.513.082.435,00
01.994.001	tanpa suboutput				2.170.895.095,00				2.279.439.852,00	2.393.411.838,00	2.513.082.435,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	416,00	Bulan	5.026.116,35	2.090.864.402,00	416,00	416,00	416,00	2.195.407.623,00	2.305.178.002,00	2.420.436.904,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	384,00	Bulan	208.413,26	80.030.693,00	384,00	384,00	384,00	84.032.229,00	88.233.836,00	92.645.531,00
	Total				2.308.027.217,00	-	-	-	2.423.428.580,00	2.553.768.413,00	2.671.830.026,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi		2.308.027.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.027.217,00
01.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		104.481.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.481.222,00
01.950.001	Tanpa suboutput		104.481.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.481.222,00
01.950.001.051	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran	Pendukung	22.533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.533.000,00
01.950.001.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	23.134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134.500,00
01.950.001.054	Pengelolaan keuangan	Pendukung	22.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978.000,00
01.950.001.057	Pengelolaan kepegawaian	Pendukung	19.705.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705.786,00
01.950.001.061	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi	Pendukung	16.129.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129.936,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		32.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650.900,00
01.951.001	Tanpa suboutput		32.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650.900,00
01.951.001.051	Pengadaan kendaraan bermotor	Pendukung	7.897.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897.183,00
01.951.001.052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pendukung	3.158.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.325,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Pendukung	5.187.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.187.738,00
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Pendukung	16.407.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407.654,00
01.994	Layanan Perkantoran		2.170.895.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895.095,00
01.994.001	tanpa suboutput		2.170.895.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.895.095,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	2.090.864.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.864.402,00
01.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	80.030.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030.693,00
Total			2.308.027.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.027.217,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BkkbN

Nopdal, SP, MA
NIP. 19601 111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 03 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3306 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah III
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Inspektorat wilayah III
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III		3.772.000,00
01.01	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14	
	Total		3.772.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III*											3.772.000,00
01.965	Layanan Audit Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.772.000,0
01.965.001	Tanpa suboutput											3.772.000,00
	051 - Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal											186.284,00
		Pusat	Pusat									186.284,00
	052 - Pelaksanaan audit internal											1.530.071,00
		Pusat	Pusat									1.530.071,00
	053 - Pelaksanaan audit khusus											98.250,00
		Pusat	Pusat									98.250,00
	056 - Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan											1.235.983,00
		Pusat	Pusat									1.235.983,00
	070 - Penyusunan laporan											721.412,00
		Pusat	Pusat									721.412,00
	Total											3.772.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III				3.772.000,00				3.960.601,00	4.158.630,00	4.366.562,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		3.772.000,00				3.960.601,00	4.158.630,00	4.366.562,00
01.965.001	Tanpa suboutput				3.772.000,00				3.960.601,00	4.158.630,00	4.366.562,00
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1,00	dokumen	186.284,00	186.284,00	0,00	0,00	0,00	195.598,00	205.378,00	215.647,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	14,00	laporan	109.290,79	1.530.071,00	0,00	0,00	0,00	1.606.575,00	1.686.903,00	1.771.248,00
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	14,00	laporan	7.017,86	98.250,00	0,00	0,00	0,00	103.163,00	108.321,00	113.737,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	14,00	laporan	88.284,50	1.235.983,00	0,00	0,00	0,00	1.297.782,00	1.362.671,00	1.430.805,00
01.965.001.070	Penyusunan laporan	14,00	dokumen	51.529,43	721.412,00	0,00	0,00	0,00	757.483,00	795.357,00	835.125,00
Total					3.772.000,00	-	-	-	3.960.601,00	4.158.630,00	4.366.562,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III		3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00
01.965	Layanan Audit Internal		3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00
01.965.001	Tanpa suboutput		3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	Pendukung	186.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.284,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	Pendukung	1.530.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.071,00
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	Pendukung	98.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.250,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	Pendukung	1.235.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.983,00
01.965.001.070	Penyusunan laporan	Pendukung	721.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.412,00
Total			3.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 03 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3307 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah I
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Inspektorat wilayah I
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya pelaksanaan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I		3.009.000,00
01.01	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14	
	Total		3.009.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terlaksananya pelaksanaan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I*											3.009.000,00
01.965	Layanan Audit Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.009.000,00
01.965.001	Tanpa suboutput											3.009.000,00
	051 - Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal											225.072,
		Pusat	Pusat									225.072,00
	052 - Pelaksanaan audit internal											1.208.990,00
		Pusat	Pusat									1.208.990,00
	053 - Pelaksanaan audit khusus											63.450,00
		Pusat	Pusat									63.450,00
	056 - Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan											645.598,00
		Pusat	Pusat									645.598,00
	070 - Penyusunan laporan											865.890,00
		Pusat	Pusat									865.890,00
	Total											3.009.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terlaksananya pelaksanaan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I				3.009.000,00				3.159.452,00	3.317.423,00	3.483.293,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		3.009.000,00				3.159.452,00	3.317.423,00	3.483.293,00	
01.965.001	Tanpa suboutput				3.009.000,00				3.159.452,00	3.317.423,00	3.483.293,00	
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan Internal	2,00	dokumen	112.536,00	225.072,00	0,00	0,00	0,00	236.326,00	248.142,00	260.549,00	
01.965.001.052	Pelaksanaan audit Internal	14,00	laporan	86.356,43	1.208.990,00	0,00	0,00	0,00	1.269.440,00	1.332.911,00	1.399.557,00	
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	95,00	persen	667,89	63.450,00	0,00	0,00	0,00	66.623,00	69.954,00	73.451,00	
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	95,00	persen	6.795,77	645.598,00	0,00	0,00	0,00	677.878,00	711.772,00	747.360,00	
01.965.001.070	Penyusunan laporan	14,00	dokumen	61.849,29	865.890,00	0,00	0,00	0,00	909.185,00	954.644,00	1.002.376,00	
Total					3.009.000,00	-	-	-	3.159.452,00	3.317.423,00	3.483.293,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya pelaksanaan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I		3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00
01.965	Layanan Audit Internal		3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00
01.965.001	Tanpa suboutput		3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan Internal	Pendukung	225.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.072,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit Internal	Pendukung	1.208.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.990,00
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	Pendukung	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	Pendukung	645.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.598,00
01.965.001.070	Penyusunan laporan	Pendukung	865.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.890,00
Total			3.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 03 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3308 - Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah II
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Inspektorat wilayah II
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II	-	3.536.000,00
01.01	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14	
	Total		3.536.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terlaksananya pelaksanaan pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II*											3.536.000,00
01.965	Layanan Audit Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.536.000,00
01.965.001	Tanpa Suboutput											3.536.000,00
	051 - Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal											414.051,00
		Pusat	Pusat									414.051,00
	052 - Pelaksanaan audit internal											1.224.739,00
		Pusat	Pusat									1.224.739,00
	053 - Pelaksanaan audit khusus											75.960,00
		Pusat	Pusat									75.960,00
	056 - Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan											1.649.196,00
		Pusat	Pusat									1.649.196,00
	070 - Penyusunan laporan											172.054,00
		Pusat	Pusat									172.054,00
	Total											3.536.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan Intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II				3.536.000,00				3.712.801,00	3.898.441,00	4.093.362,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01.965	Layanan Audit Internal				3.536.000,00				3.712.801,00	3.898.441,00	4.093.362,00	
01.965.001	Tanpa Suboutput	1	Layanan		3.536.000,00				3.712.801,00	3.898.441,00	4.093.362,00	
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1,00	dokumen	414.051,00	414.051,00	0,00	0,00	0,00	434.754,00	456.491,00	479.316,00	
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	14,00	laporan	87.481,36	1.224.739,00	0,00	0,00	0,00	1.285.976,00	1.350.275,00	1.417.788,00	
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	95,00	persen	799,58	75.960,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00	83.746,00	87.933,00	
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	95,00	persen	17.359,96	1.649.196,00	0,00	0,00	0,00	1.731.656,00	1.818.239,00	1.909.151,00	
01.965.001.070	Penyusunan laporan	14,00	dokumen	12.289,57	172.054,00	0,00	0,00	0,00	180.657,00	189.690,00	199.174,00	
	Total				3.536.000,00	-	-	-	3.712.801,00	3.898.441,00	4.093.362,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II		3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00
01.965	Layanan Audit Internal		3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00
01.965.001	Tanpa Suboutput		3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00
01.965.001.051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	Pendukung	414.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.051,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	Pendukung	1.224.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.739,00
01.965.001.053	Pelaksanaan audit khusus	Pendukung	75.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.960,00
01.965.001.056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	Pendukung	1.649.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.196,00
01.965.001.070	Penyusunan laporan	Pendukung	172.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.054,00
	Total		3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nurdin, SP, MA
NIP 196011[illegible]1985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 03 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK
4. KEGIATAN : 5298 - Pengelolaan Program Pengawasan Provinsi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		2.928.071,00
01.01	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	34	
	Total		2.928.071,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi*											2.928.071,00
01.965	Layanan Audit Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.928.071 00
01.965.001	Tanpa Suboutput											2.928.071,00
	052 - Pelaksanaan audit internal											2.928.071,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									60.025,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									137.619,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									63.999,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									95.162,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									60.025,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									131.763 0
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									60.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									68.810,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									58.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									88.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									40.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									168.364,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									170.560,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									135.064,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									146.406,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									60.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									90.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									60.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									60.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									98.822,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									87.842,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									85.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									90.418,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									98.090,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									85.418,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									90.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									87.842,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									55.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									50.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									90.842,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									85.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									80.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									90.000,00
							Total					2.928.071,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi				2.928.071,00				3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00
01.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		2.928.071,00				3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00
01.965.001	Tanpa Suboutput				2.928.071,00				3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	0,00	dokumen	NaN	2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00
Total					2.928.071,00	-	-	-	3.074.474,00	3.228.200,00	3.389.606,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi		2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00
01.965	Layanan Audit Internal		2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00
01.965.001	Tanpa Suboutput		2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00
01.965.001.052	Pelaksanaan audit internal	Pendukung	2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
Total			2.928.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.071,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011 11985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 04 - Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3309 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB		22.881.960,00
01.01	Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkat Kualitasnya	80	
	Total		22.881.960,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB*											22.881.960,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.000.685,00
01.953.001	Tanpa Suboutput											1.000.685,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											1.000.685,00
		Pusat	Pusat									1.000.685,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	6.104.733,00
01.966.001	Tanpa Suboutput											6.104.733,00
	051 - Standardisasi dan sertifikasi											1.862.792,00
		Pusat	Pusat									1.862.792,00
	052 - Pengembangan kompetensi											4.241.941,00
		Pusat	Pusat									4.241.941,00
01.968	Layanan Pendidikan Kedinasan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	15.776.542,00
01.968.001	Tanpa Suboutput											15.776.542,00
	052 - Pelaksanaan pendidikan											15.776.542,00
		Pusat	Pusat									15.776.542,00
	Total											22.881.960,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB				22.881.960,00				24.026.058,00	25.227.361,00	26.488.729,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.000.685,00				1.050.719,00	1.103.255,00	1.158.418,00
01.953.001	Tanpa Suboutput				1.000.685,00				1.050.719,00	1.103.255,00	1.158.418,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	12,00	kegiatan	83.390,42	1.000.685,00	0,00	0,00	0,00	1.050.719,00	1.103.255,00	1.158.418,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan		6.104.733,00				6.409.970,00	6.730.468,00	7.066.992,00
01.966.001	Tanpa Suboutput				6.104.733,00				6.409.970,00	6.730.468,00	7.066.992,00
01.966.001.051	Standardisasi dan sertifikasi	12,00	Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi	155.232,67	1.862.792,00	0,00	0,00	0,00	1.955.932,00	2.053.728,00	2.156.415,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	104,00	orang	40.787,89	4.241.941,00	0,00	0,00	0,00	4.454.038,00	4.676.740,00	4.910.577,00
01.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	1	Layanan		15.776.542,00				16.565.369,00	17.393.638,00	18.263.319,00
01.968.001	Tanpa Suboutput				15.776.542,00				16.565.369,00	17.393.638,00	18.263.319,00
01.968.001.052	Pelaksanaan pendidikan	64,00	Orang	246.508,47	15.776.542,00	0,00	0,00	0,00	16.565.369,00	17.393.638,00	18.263.319,00
Total					22.881.960,00	-	-	-	24.026.058,00	25.227.361,00	26.488.729,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB		22.881.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881.960,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.000.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.685,00
01.953.001	Tanpa Suboutput		1.000.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.685,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	1.000.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.685,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		6.104.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.733,00
01.966.001	Tanpa Suboutput		6.104.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.733,00
01.966.001.051	Standardisasi dan sertifikasi	Pendukung	1.862.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.792,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	Pendukung	4.241.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.941,00
01.968	Layanan Pendidikan Kedinasan		15.776.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776.542,00
01.968.001	Tanpa Suboutput		15.776.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776.542,00
01.968.001.052	Pelaksanaan pendidikan	Pendukung	15.776.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.776.542,00
Total			22.881.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881.960,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrial, SP, MA
NIP. 19681111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 04 - Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3310 - Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS		6.120.000,00
01.01	Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	18	
	Total		6.120.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS*											6.120.000,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	757.736,00
01.953.001	Tanpa suboutput											757.736,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											757.736,00
		Pusat	Pusat									757.736,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	5.362.264,00
01.967.001	Tanpa Suboutput											5.362.264,00
	051 - Pelaksanaan penelitian											4.350.386,00
		Pusat	Pusat									4.350.386,00
	053 - Pelaksanaan pengembangan											398.648,00
		Pusat	Pusat									398.648,00
	054 - Penerapan hasil litbang											613.230,00
		Pusat	Pusat									613.230,00
	Total											6.120.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS				6.120.000,00				6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		757.736,00				795.623,00	835.404,00	877.174,00
01.953.001	Tanpa suboutput				757.736,00				795.623,00	835.404,00	877.174,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	34,00	provinsi	22.286,35	757.736,00	0,00	0,00	0,00	795.623,00	835.404,00	877.174,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	Layanan		5.362.264,00				5.630.377,00	5.911.896,00	6.207.491,00
01.967.001	Tanpa Suboutput				5.362.264,00				5.630.377,00	5.911.896,00	6.207.491,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	18,00	penelitian	241.688,11	4.350.386,00	0,00	0,00	0,00	4.567.905,00	4.796.301,00	5.036.116,00
01.967.001.053	Pelaksanaan pengembangan	5,00	laporan	79.729,60	398.648,00	0,00	0,00	0,00	418.580,00	439.509,00	461.485,00
01.967.001.054	Penerapan hasil litbang	2,00	laporan	306.615,00	613.230,00	0,00	0,00	0,00	643.892,00	676.086,00	709.890,00
Total					6.120.000,00	-	-	-	6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		757.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.736,00
01.953.001	Tanpa suboutput		757.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.736,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	757.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.736,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan		5.362.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362.264,00
01.967.001	Tanpa Suboutput		5.362.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362.264,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	Pendukung	4.350.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.386,00
01.967.001.053	Pelaksanaan pengembangan	Pendukung	398.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.648,00
01.967.001.054	Penerapan hasil litbang	Pendukung	613.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.230,00
Total			6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopial, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 04 - Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3311 - Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan		6.120.000,00
01.01	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	17	
	Total		6.120.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan*											6.120.000,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.259.380,00
01.953.001	Tanpa suboutput											1.259.380,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											1.259.380,00
		Pusat	Pusat									1.259.380,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.860.620,00
01.967.001	Tanpa Suboutput											4.860.620,00
	051 - Pelaksanaan penelitian											2.574.899,00
		Pusat	Pusat									2.574.899,00
	053 - Pelaksanaan pengembangan											1.391.560,00
		Pusat	Pusat									1.391.560,00
	054 - Penerapan hasil litbang											894.161,00
		Pusat	Pusat									894.161,00
	Total											6.120.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan				6.120.000,00				6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.259.380,00				1.322.349,00	1.388.466,00	1.457.890,00
01.953.001	Tanpa suboutput				1.259.380,00				1.322.349,00	1.388.466,00	1.457.890,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	34,00	provinsi	37.040,59	1.259.380,00	0,00	0,00	0,00	1.322.349,00	1.388.466,00	1.457.890,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	Layanan		4.860.620,00				5.103.651,00	5.358.834,00	5.626.775,00
01.967.001	Tanpa Suboutput				4.860.620,00				5.103.651,00	5.358.834,00	5.626.775,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	17,00	Dokumen (Topik) penelitian	151.464,65	2.574.899,00	0,00	0,00	0,00	2.703.644,00	2.838.826,00	2.980.767,00
01.967.001.053	Pelaksanaan pengembangan	34,00	mitra	40.928,24	1.391.560,00	0,00	0,00	0,00	1.461.138,00	1.534.195,00	1.610.905,00
01.967.001.054	Penerapan hasil litbang	7,00	laporan	127.737,29	894.161,00	0,00	0,00	0,00	938.869,00	985.813,00	1.035.103,00
Total					6.120.000,00	-	-	-	6.426.000,00	6.747.300,00	7.084.665,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan		6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.259.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.380,00
01.953.001	Tanpa suboutput		1.259.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.380,0
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	1.259.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.380,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan		4.860.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.620,00
01.967.001	Tanpa Suboutput		4.860.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.620,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	Pendukung	2.574.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.899,00
01.967.001.053	Pelaksanaan pengembangan	Pendukung	1.391.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.560,00
01.967.001.054	Penerapan hasil litbang	Pendukung	894.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.161,00
Total			6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopi Jal, SP, MA
NIP 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 04 - Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
4. KEGIATAN : 3312 - Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional		9.769.981,00
01.01	Jumlah SDM Aparatur yang Meningkat Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri	40	
	Total		9.769.981,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional*											9.769.981,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.823.418,00
01.953.001	Tanpa suboutput											1.823.418,00
	051 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											1.823.418,00
		Pusat	Pusat									1.823.418,00
01.964	Layanan Kerjasama Internasional								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	158.083,00
01.964.001	Tanpa suboutput											158.083,00
	051 - Administrasi proyek yang didanai hibah											0,00
		Pusat	Pusat									0,00
	070 - Penyusunan laporan											158.083,00
		Pusat	Pusat									158.083,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	7.788.480,00
01.966.001	Tanpa Suboutput											7.788.480,00
	052 - Pengembangan kompetensi											7.788.480,00
		Pusat	Pusat									7.788.480,00
	Total											9.769.981,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional				9.769.981,00				10.258.480,00	10.771.404,00	11.309.974,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		1.823.418,00				1.914.589,00	2.010.318,00	2.110.834,00
01.953.001	Tanpa suboutput				1.823.418,00				1.914.589,00	2.010.318,00	2.110.834,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	11,00	dokumen	165.765,27	1.823.418,00	0,00	0,00	0,00	1.914.589,00	2.010.318,00	2.110.834,00
01.964	Layanan Kerjasama Internasional	1	Layanan		158.083,00				165.987,00	174.287,00	183.001,00
01.964.001	Tanpa suboutput				158.083,00				165.987,00	174.287,00	183.001,00
01.964.001.051	Administrasi proyek yang didanai hibah	11,00	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.964.001.070	Penyusunan laporan	11,00	dokumen	14.371,18	158.083,00	0,00	0,00	0,00	165.987,00	174.287,00	183.001,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan		7.788.480,00				8.177.904,00	8.586.799,00	9.016.139,00
01.966.001	Tanpa Suboutput				7.788.480,00				8.177.904,00	8.586.799,00	9.016.139,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	11,00	dokumen	708.043,64	7.788.480,00	0,00	0,00	0,00	8.177.904,00	8.586.799,00	9.016.139,00
Total					9.769.981,00	-	-	-	10.258.480,00	10.771.404,00	11.309.974,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional		9.769.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769.981,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.823.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.418,00
01.953.001	Tanpa suboutput		1.823.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.418,00
01.953.001.051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	1.823.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.418,00
01.964	Layanan Kerjasama Internasional		158.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.083,00
01.964.001	Tanpa suboutput		158.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.083,00
01.964.001.051	Administrasi proyek yang didanai hibah	Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.964.001.070	Penyusunan laporan	Pendukung	158.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.083,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		7.788.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788.480,00
01.966.001	Tanpa Suboutput		7.788.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788.480,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	Pendukung	7.788.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788.480,00
Total			9.769.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769.981,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BKKBN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 04 - Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK
4. KEGIATAN : 5299 - Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		84.265.987,00
01.01	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	
01.02	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3	
	Total		84.265.987,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi*											84.265.987,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	44.766.601,00
01.966.001	Tanpa Suboutput											44.766.601,00
	052 - Pengembangan kompetensi											44.766.601,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.643.039,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									2.353.112,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.375.550,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									940.653,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.113.498,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.396.805,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									1.004.871,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									1.430.204,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									658.693,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									703.848,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									575.480,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									3.094.912,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									3.017.904,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									812.216,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									3.606.014,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									752.998,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									985.314,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.157.389,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.665.754,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.050.885,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									988.816,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.165.416,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.393.864,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.030.381,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.154.859,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									2.565.494,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.213.580,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									792.225,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									788.135,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									971.703,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.056.366,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									992.702,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.313.921,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	39.499.386,00
01.967.001	Tanpa Suboutput											39.499.386,00
	051 - Pelaksanaan penelitian											39.499.386,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.385.969,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.768.389,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.206.648,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									823.819,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									787.838,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.246.829,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									1.003.737,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									941.965,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									770.100,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									720.712,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									930.168,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.871.650,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									2.075.661,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									786.379,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									3.368.653,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.189.906,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									835.396,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									981.964,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.371.393,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									811.327,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									718.334,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.160.214,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.615.706,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									690.931,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.067.459,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									1.670.932,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.116.841,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									839.141,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									807.234,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									966.154,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.150.914,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									890.329,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.926.694,00
			Total									84.265.987,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi				84.265.987,00				88.479.289,00	92.903.249,00	97.548.412,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1	Layanan		44.766.601,00				47.004.933,00	49.355.178,00	51.822.937,00
01.966.001	Tanpa Suboutput				44.766.601,00				47.004.933,00	49.355.178,00	51.822.937,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	0,00	dokumen	NaN	44.766.601,00	0,00	0,00	0,00	47.004.933,00	49.355.178,00	51.822.937,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan	1	Layanan		39.499.386,00				41.474.356,00	43.548.071,00	45.725.475,00
01.967.001	Tanpa Suboutput				39.499.386,00				41.474.356,00	43.548.071,00	45.725.475,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	0,00	dokumen	NaN	39.499.386,00	0,00	0,00	0,00	41.474.356,00	43.548.071,00	45.725.475,00
	Total				84.265.987,00	-	-	-	88.479.289,00	92.903.249,00	97.548.412,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi		84.265.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.265.987,00
01.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		44.766.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.766.601,00
01.966.001	Tanpa Suboutput		44.766.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.766.601,00
01.966.001.052	Pengembangan kompetensi	Pendukung	44.766.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.766.601,00
01.967	Layanan Penelitian dan Pengembangan		39.499.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.499.386,00
01.967.001	Tanpa Suboutput		39.499.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.499.386,00
01.967.001.051	Pelaksanaan penelitian	Pendukung	39.499.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.499.386,00
Total			84.265.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.265.987,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Notrijal, SP, MA
NIP. 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah

4. KEGIATAN : 3313 - Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK		80.923.400,00
01.01	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	90	
01.02	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	82	
01.03	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	79,1	
	Total		80.923.400,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK*											80.923.400,00
1.021	Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	80.923.400,00
01.021.001	tanpa suboutput											80.923.400,00
	171 - Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Media											6.660.314,00
		Pusat	Pusat									6.660.314,00
	172 - Peningkatan Advokasi Program KKBPK bersama mitra kerja											16.964.564,00
		Pusat	Pusat									16.964.564,00
	173 - Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum											3.294.048,00
		Pusat	Pusat									3.294.048,00
	174 - Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											24.711.474,00
		Pusat	Pusat									24.711.474,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	175 - Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Lini Bawah											20.115.871,00
		Pusat	Pusat									20.115.871,00
	176 - Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK											4.276.327,00
		Pusat	Pusat									4.276.327,00
	177 - Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga Lini Lapangan											3.496.225,00
		Pusat	Pusat									3.496.225,00
	178 - Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK											1.404.577,00
		Pusat	Pusat									1.404.577,
	Total											80.923.400,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK				80.923.400,00				84.969.567,00	89.218.044,00	93.678.943,00
01.021	Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK	50	persen		80.923.400,00				84.969.567,00	89.218.044,00	93.678.943,00
01.021.001	tanpa suboutput				80.923.400,00				84.969.567,00	89.218.044,00	93.678.943,00
01.021.001.171	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Media	14,00	Media	475.736,71	6.660.314,00	0,00	0,00	0,00	6.993.330,00	7.342.996,00	7.710.146,00
01.021.001.172	Peningkatan Advokasi Program KKBPK bersama mitra kerja	90,00	Persen	188.495,16	16.964.564,00	0,00	0,00	0,00	17.812.792,00	18.703.432,00	19.638.603,00
01.021.001.173	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum	23,00	Momentum	143.219,48	3.294.048,00	0,00	0,00	0,00	3.458.750,00	3.631.688,00	3.813.272,00
01.021.001.174	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25,00	Jenis	988.458,96	24.711.474,00	0,00	0,00	0,00	25.947.047,00	27.244.399,00	28.606.618,00
01.021.001.175	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Lini Bawah	14,00	Jenis	1.436.847,93	20.115.871,00	0,00	0,00	0,00	21.121.664,00	22.177.747,00	23.286.634,00
01.021.001.176	Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	5,00	Dokumen	855.265,40	4.276.327,00	0,00	0,00	0,00	4.490.143,00	4.714.650,00	4.950.382,00
01.021.001.177	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga Lini Lapangan	7,00	Dukungan	499.460,71	3.496.225,00	0,00	0,00	0,00	3.671.036,00	3.854.587,00	4.047.316,00
01.021.001.178	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	34,00	Provinsi	41.311,09	1.404.577,00	0,00	0,00	0,00	1.474.805,00	1.548.545,00	1.625.972,00
	Total				80.923.400,00	-	-	-	84.969.567,00	89.218.044,00	93.678.943,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK		80.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923.400,00
01.021	Pemahaman masyarakat tentang program KKBPK		80.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923.400,00
01.021.001	tanpa suboutput		80.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923.400,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.021.001.171	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Media	Pendukung	6.660.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660.314,00
01.021.001.172	Peningkatan Advokasi Program KKBPK bersama mitra kerja	Pendukung	16.964.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964.564,00
01.021.001.173	Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum	Utama	3.294.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.048,00
01.021.001.174	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pendukung	24.711.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711.474,00
01.021.001.175	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Lini Bawah	Pendukung	20.115.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.115.871,00
01.021.001.176	Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Utama	4.276.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.327,00
01.021.001.177	Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga Lini Lapangan	Utama	3.496.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.225,00
01.021.001.178	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Utama	1.404.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.577,00
Total			80.923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.923.400,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopi Hidayat, SE, MA
NIP. 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3314 - Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pelaporan dan Statistik
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN		6.887.000,00
01.01	Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi	17	
01.02	Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK	591 orang	
	Total		6.887.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN*											6.887.000,00
01.023	Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	6.887.000,00
01.023.001	tanpa suboutput											6.887.000,00
	201 - Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPK											708.570,00
		Pusat	Pusat									708.570,00
	202 - Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan											1.208.429,00
		Pusat	Pusat									1.208.429,00
	203 - Peningkatan kualitas data melalui penguatan sistem pelaporan dan statistik rutin											2.131.429,00
		Pusat	Pusat									2.131.429,00
	204 - Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi											1.017.143,00
		Pusat	Pusat									1.017.143,00
	205 - Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan informasi											1.821.429,00
		Pusat	Pusat									1.821.429,00
	Total											6.887.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN				6.887.000,00				7.231.348,00	7.592.916,00	7.972.563,00
01.023	Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK	17	sub sistem		6.887.000,00				7.231.348,00	7.592.916,00	7.972.563,00
01.023.001	tanpa suboutput				6.887.000,00				7.231.348,00	7.592.916,00	7.972.563,00
01.023.001.201	Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPK	3,00	Dokumen	236.190,00	708.570,00	0,00	0,00	0,00	743.998,00	781.198,00	820.258,00
01.023.001.202	Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan	17,00	Dokumen	71.084,06	1.208.429,00	0,00	0,00	0,00	1.268.850,00	1.332.293,00	1.398.908,00
01.023.001.203	Peningkatan kualitas data melalui penguatan sistem pelaporan dan statistik rutin	3,00	indeks kepuasan	710.476,33	2.131.429,00	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00	2.349.900,00	2.467.395,00
01.023.001.204	Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi	591,00	orang	1.721,05	1.017.143,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00	1.121.400,00	1.177.470,00
01.023.001.205	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	19,00	provinsi	95.864,68	1.821.429,00	0,00	0,00	0,00	1.912.500,00	2.008.125,00	2.108.532,00
	Total				6.887.000,00	-	-	-	7.231.348,00	7.592.916,00	7.972.563,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN		6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00
01.023	Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK		6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00
01.023.001	tanpa suboutput		6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00
01.023.001.201	Pengembangan Kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPK	Utama	708.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.570,00
01.023.001.202	Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan	Utama	1.208.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.429,00
01.023.001.203	Peningkatan kualitas data melalui penguatan sistem pelaporan dan statistik rutin	Utama	2.131.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.429,00
01.023.001.204	Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi	Utama	1.017.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.143,00
01.023.001.205	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	Utama	1.821.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.429,00
	Total		6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP 196011 11985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3315 - Peningkatan Kemitraan dengan Stakeholder dan Mitra Kerja
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK		4.074.000,00
01.01	Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK	80%	
01.02	Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	90%	
	Total		4.074.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK*											4.074.000,00
01.023	Komitmen dan peran serta mitra yang mendukung operasional program KKBPK			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.074.000,00
01.023.001	tanpa suboutput											4.074.000,00
	181 - Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakkan operasional program KKBPK											1.663.110,00
		Pusat	Pusat									1.663.110,00
	182 - Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional program KKBPK											887.519,00
		Pusat	Pusat									887.519,00
	183 - Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan											738.967,00
		Pusat	Pusat									738.967,00
	184 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah											784.404,00
		Pusat	Pusat									784.404,00
	Total											4.074.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK				4.074.000,00				4.277.699,00	4.491.585,00	4.716.165,00	
01.023	Komitmen dan peran serta mitra yang mendukung operasional program KKBPK	56	mitra kerja		4.074.000,00				4.277.699,00	4.491.585,00	4.716.165,00	
01.023.001	tanpa suboutput				4.074.000,00				4.277.699,00	4.491.585,00	4.716.165,00	
01.023.001.181	Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	5,00	kegiatan	332.622,00	1.663.110,00	0,00	0,00	0,00	1.746.265,00	1.833.579,00	1.925.258,00	
01.023.001.182	Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	56,00	mitra kerja	15.848,55	887.519,00	0,00	0,00	0,00	931.895,00	978.490,00	1.027.414,00	
01.023.001.183	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan	4,00	dokumen	184.741,75	738.967,00	0,00	0,00	0,00	775.915,00	814.711,00	855.447,00	
01.023.001.184	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah	28,00	Provinsi	28.014,43	784.404,00	0,00	0,00	0,00	823.624,00	864.805,00	908.046,00	
	Total				4.074.000,00	-	-	-	4.277.699,00	4.491.585,00	4.716.165,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK		4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
01.023	Komitmen dan peran serta mitra yang mendukung operasional program KKBPK		4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
01.023.001	tanpa suboutput		4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00
01.023.001.181	Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	Utama	1.663.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.110,00
01.023.001.182	Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional program KKBPK	Utama	887.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.519,00
01.023.001.183	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan	Utama	738.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.967,00
01.023.001.184	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah	Utama	784.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.404,00
	Total		4.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nurdin, SP, MA
NIP. 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3316 - Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah		34.322.003,00
01.01	Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan	55	
01.02	Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019: 45.340 Faskes s/d tahun 2019)	85.0%	
01.03	Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	12 kali di setiap provinsi	
	Total		34.322.003,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah*											34.322.003,00
01.019	Faskes yang memberikan pelayanan KB berkualitas			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	33.466.133,00
01.019.001	tanpa suboutput											33.466.133,00
	091 - Penguatan Kebijakan dan Strategi Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah yang Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan											688.165,00
		Pusat	Pusat									688.165,00
	092 - Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB											623.772,00
		Pusat	Pusat									623.772,00
	093 - Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB di Faskes Pemerintah											933.085,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat									933.085,00
	094 - Jaminan Ketersediaan Alokon											29.450.021,00
		Pusat	Pusat									29.450.021,00
	095 - Pemenuhan Sarana Pelayanan KB											0,00
		Pusat	Pusat									0,00
	096 - Penguatan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah											239.690,00
		Pusat	Pusat									239.690,00
	097 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kesertaan KB Jalur Pemerintah											1.531.400,00
		Pusat	Pusat									1.531.400,00
01.020	Pemenuhan Ketersediaan Alokon			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	855.870,00
01.020.001	Tanpa Sub Output											
	098 - Jaminan Ketersediaan Alokon											855.870,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									855.870,00
												855.870,00
					Total							34.322.003,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah				34.322.003,00				36.038.104,00	37.840.009,00	39.732.009,00
01.019	Faskes yang memberikan pelayanan KB berkualitas	18876	faskes		33.466.133,00				35.139.440,00	36.896.412,00	38.741.232,00
01.019.001	tanpa suboutput				33.466.133,00				35.139.440,00	36.896.412,00	38.741.232,00
01.019.001.091	Penguatan Kebijakan dan Strategi Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah yang Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan	4,00	Dokumen	172.041,25	688.165,00	0,00	0,00	0,00	722.573,00	758.702,00	796.637,00
01.019.001.092	Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB	3,00	Dokumen	207.924,00	623.772,00	0,00	0,00	0,00	654.961,00	687.709,00	722.094,00
01.019.001.093	Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB di Faskes Pemerintah	5,00	Dokumen	186.617,00	933.085,00	0,00	0,00	0,00	979.739,00	1.028.726,00	1.080.163,00
01.019.001.094	Jaminan Ketersediaan Alokon	10,00	Dokumen	2.945.002,10	29.450.021,00	0,00	0,00	0,00	30.922.522,00	32.468.648,00	34.092.080,00
01.019.001.095	Pemenuhan Sarana Pelayanan KB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019.001.096	Penguatan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah	12,00	mitra kerja	19.974,17	239.690,00	0,00	0,00	0,00	251.675,00	264.258,00	277.471,00
01.019.001.097	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kesertaan KB Jalur Pemerintah	6,00	Dokumen	255.233,33	1.531.400,00	0,00	0,00	0,00	1.607.970,00	1.688.369,00	1.772.787,00
01.020	Pemenuhan Ketersediaan Alokon	529	faskes		855.870,00				898.664,00	943.597,00	990.777,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01.020.001	Tanpa Sub Output				855.870,00				898.664,00	943.597,00	990.777,00
01.020.001.098	Jaminan Ketersediaan Alokon	529,00	faskes	1.617,90	855.870,00	0,00	0,00	0,00	898.664,00	943.597,00	990.777,00
	Total				34.322.003,00	-	-	-	36.038.104,00	37.840.009,00	39.732.009,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah		34.322.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322.003,00
01.019	Faskes yang memberikan pelayanan KB berkualitas		33.466.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.466.133,00
1.019.001	tanpa suboutput		33.466.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.466.133,00
01.019.001.091	Penguatan Kebijakan dan Strategi Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah yang Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan	Utama	688.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.165,00
01.019.001.092	Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB	Utama	623.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.772,00
01.019.001.093	Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB di Faskes Pemerintah	Utama	933.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.085,00
01.019.001.094	Jaminan Ketersediaan Alokon	Utama	29.450.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450.021,00
01.019.001.095	Pemenuhan Sarana Pelayanan KB	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.019.001.096	Penguatan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah	Utama	239.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.690,00
01.019.001.097	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kesertaan KB Jalur Pemerintah	Utama	1.531.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.400,00
01.020	Pemenuhan Ketersediaan Alokon		855.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.870,00
01.020.001	Tanpa Sub Output		855.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.870,00
01.020.001.098	Jaminan Ketersediaan Alokon	Utama	855.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.870,00
	Total		34.322.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.322.003,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopian, SE, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3317 - Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		3.726.700,00
01.01	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	70.5%	
01.02	Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	80%	
	Total		3.726.700,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak*											3.726.700,00
01.021	Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		tidak	3.726.700,00
01.021.001	tanpa suboutput											
	131 - Promosi Pembinaan Keluarga BKB											3.726.700,00
		Pusat	Pusat									567.800,00
	132 - Penguatan Jejaring Kemitraan BKB											567.800,00
		Pusat	Pusat									873.486,00
	133 - Peningkatan Kualitas pembinaan kelompok BKB HI											873.486,00
		Pusat	Pusat									1.132.540,00
	134 - Monitoring dan Evaluasi Program Bina Keluarga Balita											1.132.540,00
		Pusat	Pusat									1.152.874,00
	Total											1.152.874,00
												3.726.700,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak				3.726.700,00				3.913.035,00	4.108.686,00	4.314.120,00
01.021	Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	10070635	keluarga		3.726.700,00				3.913.035,00	4.108.686,00	4.314.120,00
01.021.001	tanpa suboutput				3.726.700,00				3.913.035,00	4.108.686,00	4.314.120,00
01.021.001.131	Promosi Pembinaan Keluarga BKB	4,00	Kegiatan	141.950,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	596.190,00	625.999,00	657.299,00
01.021.001.132	Penguatan Jejaring Kemitraan BKB	5,00	Mitra	174.697,20	873.486,00	0,00	0,00	0,00	917.160,00	963.018,00	1.011.169,00
01.021.001.133	Peningkatan Kualitas pembinaan kelompok BKB HI	3,00	kegiatan	377.513,33	1.132.540,00	0,00	0,00	0,00	1.189.167,00	1.248.625,00	1.311.056,00
01.021.001.134	Monitoring dan Evaluasi Program Bina Keluarga Balita	34,00	provinsi	33.908,06	1.152.874,00	0,00	0,00	0,00	1.210.518,00	1.271.044,00	1.334.596,00
	Total				3.726.700,00	-	-	-	3.913.035,00	4.108.686,00	4.314.120,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		3.726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.700,00
01.021	Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		3.726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.700,00
01.021.001	tanpa suboutput		3.726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.700,00
01.021.001.131	Promosi Pembinaan Keluarga BKB	Utama	567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.800,00
01.021.001.132	Penguatan Jejaring Kemitraan BKB	Utama	873.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.486,00
01.021.001.133	Peningkatan Kualitas pembinaan kelompok BKB HI	Utama	1.132.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.540,00
01.021.001.134	Monitoring dan Evaluasi Program Bina Keluarga Balita	Utama	1.152.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.874,0
	Total		3.726.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.700,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3318 - Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Lini Lapangan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK		4.850.000,00
01.01	Jumlah SDM LIni Lapangan yang Kompeten	882	
01.02	Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya	100% dari jml PKB/PLKB	
	Total		4.850.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK*											4.850.000,00
01.028	Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi			Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.850.000,00
01.028.001	tanpa suboutput											4.850.000,00
	191 - Pengembangan Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja SDM Lini Lapangan dan Mekanisme Operasional											450.000,00
		Pusat	Pusat									450.000,00
	192 - Pengembangan Materi dan Sarana Prasarana Operasional Lini Lapangan											400.000,00
		Pusat	Pusat									400.000,00
	193 - Peningkatan Kapasitas SDM LIni Lapangan											1.700.000,00
		Pusat	Pusat									1.700.000,00
	194 - Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB											300.000,00
		Pusat	Pusat									300.000,00
	195 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan LIni lapangan											2.000.000,00
		Pusat	Pusat									2.000.000,00
	Total											4.850.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK				4.850.000,00				5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,00	
01.028	Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi	3686	PKB/PLKB		4.850.000,00				5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,00	
01.028.001	tanpa suboutput				4.850.000,00				5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,00	
01.028.001.191	Pengembangan Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja SDM Lini Lapangan dan Mekanisme Operasional	4,00	Dokumen	112.500,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	496.125,00	520.931,00	
01.028.001.192	Pengembangan Materi dan Sarana Prasarana Operasional Lini Lapangan	10,00	Paket	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	
01.028.001.193	Peningkatan Kapasitas SDM Lini Lapangan	22,00	Kegiatan	77.272,73	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.963,00	
01.028.001.194	Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB	5.000,00	Orang	60,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	330.750,00	347.287,00	
01.028.001.195	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	55,00	kegiatan	36.363,64	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00	
	Total				4.850.000,00	-	-	-	5.092.500,00	5.347.125,00	5.614.481,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
01.028	Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
01.028.001	tanpa suboutput		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
01.028.001.191	Pengembangan Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja SDM Lini Lapangan dan Mekanisme Operasional	Utama	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
01.028.001.192	Pengembangan Materi dan Sarana Prasarana Operasional Lini Lapangan	Utama	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.028.001.193	Peningkatan Kapasitas SDM Lini Lapangan	Utama	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
01.028.001.194	Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB	Utama	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.028.001.195	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	Utama	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	Total		4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3319 - Pembinaan Ketahanan Remaja
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Ketahanan Remaja
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)		6.250.000,00
01.01	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	52	
01.02	Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	76%	
	Total		6.250.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)*											6.250.000,00
01.030	PIK Remaja yang mendapatkan pembinaan genre			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	6.250.000,00
01.030.001	tanpa suboutput											6.250.000,00
	141 - Penyusunan Kebijakan, strategi, pedoman, materi dan Administrasi											635.300,00
		Pusat	Pusat									635.300,00
	142 - Penguatan Promosi dan pelembagaan Program GenRe											1.862.116,00
		Pusat	Pusat									1.862.116,00
	143 - Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M											2.995.369,00
		Pusat	Pusat									2.995.369,00
	144 - Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Program Bina Ketahanan Remaja											757.215,00
		Pusat	Pusat									757.215,00
	Total											6.250.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)				6.250.000,00				6.562.500,00	6.890.625,00	7.235.156,00
01.030	PIK Remaja yang mendapatkan pembinaan genre				6.250.000,00				6.562.500,00	6.890.625,00	7.235.156,00
01.030.001	tanpa suboutput	23128	Kelompok PIK Remaja		6.250.000,00				6.562.500,00	6.890.625,00	7.235.156,00
01.030.001.141	Penyusunan Kebijakan, strategi, pedoman, materi dan Administrasi	5,00	Dokumen	127.060,00	635.300,00	0,00	0,00	0,00	667.065,00	700.418,00	735.439,00
01.030.001.142	Penguatan Promosi dan pelembagaan Program GenRe	29.327,00	Kelompok	63,49	1.862.116,00	0,00	0,00	0,00	1.955.222,00	2.052.983,00	2.155.632,00
01.030.001.143	Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M	18.694,00	Kelompok	160,23	2.995.369,00	0,00	0,00	0,00	3.145.137,00	3.302.394,00	3.467.514,00
01.030.001.144	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Program Bina Ketahanan Remaja	34,00	Provinsi	22.271,03	757.215,00	0,00	0,00	0,00	795.076,00	834.830,00	876.571,00
	Total				6.250.000,00	-	-	-	6.562.500,00	6.890.625,00	7.235.156,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)		6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
01.030	PIK Remaja yang mendapatkan pembinaan genre		6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
01.030.001	tanpa suboutput		6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
01.030.001.141	Penyusunan Kebijakan, strategi, pedoman, materi dan Administrasi	Utama	635.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.300,00
01.030.001.142	Penguatan Promosi dan pelembagaan Program GenRe	Utama	1.862.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.116,00
01.030.001.143	Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M	Utama	2.995.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.369,00
01.030.001.144	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Program Bina Ketahanan Remaja	Utama	757.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.215,00
	Total		6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP. 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3320 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Kesehatan Reproduksi
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		3.202.520,00
01.01	Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas	85% dari 53.342 faskes	
01.02	Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKRBKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar)	25% dari 265.045 poktan	
	Total		3.202.520,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi*											3.202.520,00
01.014	PUS yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.202.520,00
01.014.001	tanpa suboutput											3.202.520,00
	121 - Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang Dikembangkan											574.789,00
		Pusat	Pusat									574.789,00
	122 - Penyediaan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan											20.811,00
		Pusat	Pusat									20.811,00
	123 - Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes											1.180.743,00
		Pusat	Pusat									1.180.743,00
	124 - Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi di DTPK											202.085,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat									202.085,00
	125 - Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK											162.552,00
		Pusat	Pusat									162.552,00
	126 - Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (di komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD)											141.927,00
		Pusat	Pusat									141.927,00
	127 - Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok kegiatan											12.089,00
		Pusat	Pusat									12.089,00
	128 - Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi											907.524,00
		Pusat	Pusat									907.524,00
	Total											3.202.520,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi				3.202.520,00				3.362.645,00	3.530.778,00	3.707.315,00	
01.014	PUS yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi	29655918	PUS		3.202.520,00				3.362.645,00	3.530.778,00	3.707.315,00	
01.014.001	tanpa suboutput				3.202.520,00				3.362.645,00	3.530.778,00	3.707.315,00	
01.014.001.121	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang Dikembangkan	6,00	Dokumen	95.798,17	574.789,00	0,00	0,00	0,00	603.528,00	633.704,00	665.389,00	
01.014.001.122	Penyediaan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	7.413,00	Faskes	2,81	20.811,00	0,00	0,00	0,00	21.852,00	22.944,00	24.091,00	
01.014.001.123	Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes	6,00	Mitra kerja	196.790,50	1.180.743,00	0,00	0,00	0,00	1.239.780,00	1.301.769,00	1.366.857,00	
01.014.001.124	Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi di DTPK	60,00	Kab/Kota	3.368,08	202.085,00	0,00	0,00	0,00	212.189,00	222.799,00	233.939,00	
01.014.001.125	Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK	1.892.625,00	PUS	0,09	162.552,00	0,00	0,00	0,00	170.680,00	179.214,00	188.174,00	
01.014.001.126	Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (di komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD)	34,00	Provinsi	4.174,32	141.927,00	0,00	0,00	0,00	149.023,00	156.475,00	164.298,00	
01.014.001.127	Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok kegiatan	66.261,00	Poktan	0,18	12.089,00	0,00	0,00	0,00	12.693,00	13.328,00	13.995,00	
01.014.001.128	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	34,00	Provinsi	26.691,88	907.524,00	0,00	0,00	0,00	952.900,00	1.000.545,00	1.050.572,00	
	Total				3.202.520,00	-	-	-	3.362.645,00	3.530.778,00	3.707 [illegible]5,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi		3.202.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.520,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.014	PUS yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi		3.202.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.520,00
01.014.001	tanpa suboutput		3.202.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.520,00
01.014.001.121	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang Dikembangkan	Utama	574.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.789,00
01.014.001.122	Penyediaan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Utama	20.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.811,00
01.014.001.123	Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes	Pendukung	1.180.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.743,00
01.014.001.124	Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi di DTPK	Utama	202.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.085,00
01.014.001.125	Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK	Utama	162.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.552,00
01.014.001.126	Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (di komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD)	Utama	141.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.927,00
01.014.001.127	Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok kegiatan	Utama	12.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,00
01.014.001.128	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	Utama	907.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.524,00
	Total		3.202.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.520,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopital, SP, MA
NIP 19601 111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3322 - Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus		4.043.208,00
01.01	Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	60% Kab Galciltas dan 65% Wilayah Kota	
	Total		4.043.208,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus*											4.043.208,00
01.020	Pembinaan kesertaan ber KB bagi keluarga miskin			Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.043.208,00
01.020.001	tanpa suboutput											4.043.208,00
	110 - Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin, DTPK dan sasaran khusus (KB Pria)											638.890,00
		Pusat	Pusat									638.890,00
	111 - Fasilitasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan DTPK											743.527,00
		Pusat	Pusat									743.527,00
	112 - Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termasuk DTPK)											951.713,00
		Pusat	Pusat									951.713,00
	113 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB Pria											922.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat									922.750,00
	114 - Pembinaan, Monitoring, Evaluasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)											786.328,00
		Pusat	Pusat									786.328,00
Total												4.043.208,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus				4.043.208,00				4.245.369,00	4.457.638,00	4.680.518,00
01.020	Pembinaan kesertaan ber KB bagi keluarga miskin	584963	keluarga miskin		4.043.208,00				4.245.369,00	4.457.638,00	4.680.518,00
01.020.001	tanpa suboutput				4.043.208,00				4.245.369,00	4.457.638,00	4.680.518,00
01.020.001.110	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin, DTPK dan sasaran khusus (KB Pria)	6,00	Dokumen	106.481,67	638.890,00	0,00	0,00	0,00	670.835,00	704.376,00	739.5 ,00
01.020.001.111	Fasilitasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan DTPK	33,00	Provinsi	22.531,12	743.527,00	0,00	0,00	0,00	780.703,00	819.739,00	860.725,00
01.020.001.112	Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termasuk DTPK)	10,00	Mitra Kerja	95.171,30	951.713,00	0,00	0,00	0,00	999.299,00	1.049.264,00	1.101.727,00
01.020.001.113	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB Pria	34,00	Provinsi	27.139,71	922.750,00	0,00	0,00	0,00	968.888,00	1.017.332,00	1.068.198,00
01.020.001.114	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	34,00	Provinsi	23.127,29	786.328,00	0,00	0,00	0,00	825.644,00	866.927,00	910.273,00
Total					4.043.208,00	-	-	-	4.245.369,00	4.457.638,00	4.680.518,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus		4.043.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.208,00
01.020	Pembinaan kesertaan ber KB bagi keluarga miskin		4.043.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.208,00
01.020.001	tanpa suboutput		4.043.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.208,00
01.020.001.110	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin, DTPK dan sasaran khusus (KB Pria)	Utama	638.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.890,00
01.020.001.111	Fasilitasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan DTPK	Utama	743.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.527,00
01.020.001.112	Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termasuk DTPK)	Utama	951.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.713,00
01.020.001.113	Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB Pria	Utama	922.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.020.001.114	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	Utama	786.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.328,00
Total			4.043.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.208,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nofrial, SP, MA
NIP. 196010111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3323 - Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB		5.282.436,00
01.01	Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	72.5%	
	Total		5.282.436,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIE
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB*											5.282.436,00
01.015	Keluarga Pra Sejahtera yang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	5.282.436,00
01.015.001	tanpa suboutput											5.282.436,00
	161 - Pengembangan kebijakan dan peningkatan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga											750.354,00
		Pusat	Pusat									750.354,00
	162 - Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kelompok UPPKS											2.963.910,00
		Pusat	Pusat									2.963.910,00
	163 - Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga											450.215,00
		Pusat	Pusat									450.215,00
	164 - Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga											1.117.957,00
		Pusat	Pusat									1.117.957,00
	Total											5.282.436,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB				5.282.436,00				5.546.559,00	5.823.886,00	6.115.080,00
01.015	Keluarga Pra Sejahtera yang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS	6552922	keluarga		5.282.436,00				5.546.559,00	5.823.886,00	6.115.080,00
01.015.001	tanpa suboutput				5.282.436,00				5.546.559,00	5.823.886,00	6.115.080,00
01.015.001.161	Pengembangan kebijakan dan peningkatan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga	5,00	dokumen	150.070,80	750.354,00	0,00	0,00	0,00	787.872,00	827.265,00	868.629,00
01.015.001.162	Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kelompok UPPKS	5,00	mitra	592.782,00	2.963.910,00	0,00	0,00	0,00	3.112.106,00	3.267.711,00	3.431.096,00
01.015.001.163	Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga	5,00	Mitra	90.043,00	450.215,00	0,00	0,00	0,00	472.726,00	496.362,00	521.180,00
01.015.001.164	Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	34,00	Provinsi	32.881,09	1.117.957,00	0,00	0,00	0,00	1.173.855,00	1.232.548,00	1.294.175,00
	Total				5.282.436,00	-	-	-	5.546.559,00	5.823.886,00	6.115.080,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB		5.282.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.436,00
01.015	Keluarga Pra Sejahtera yang aktif dalam kegiatan kelompok UPPKS		5.282.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.436,00
01.015.001	tanpa suboutput		5.282.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.436,00
01.015.001.161	Pengembangan kebijakan dan peningkatan promosi pemberdayaan ekonomi keluarga	Utama	750.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.354,00
01.015.001.162	Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kelompok UPPKS	Utama	2.963.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963.910,00
01.015.001.163	Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga	Utama	450.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.215,00
01.015.001.164	Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Utama	1.117.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.957,00
	Total		5.282.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282.436,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BKKBN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 1960 1111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3324 - Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia Dan Rentan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan		3.917.600,00
01.01	Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan	10%	
	Total		3.917.600,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan*											3.917.600,00
01.023	Keluarga yang memiliki lansia ikut kelompok kegiatan BKL			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.917.600,00
01.023.001	tanpa suboutput											3.917.600,00
	151 - Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)											1.177.384,00
		Pusat	Pusat									1.177.384,00
	152 - Peningkatan Jejaring Kemitraan											1.100.000,00
		Pusat	Pusat									1.100.000,00
	153 - Peningkatan Kualitas PPKS											525.000,00
		Pusat	Pusat									525.000,00
	154 - Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS											1.115.216,00
		Pusat	Pusat									1.115.216,00
	Total											3.917.600,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan				3.917.600,00				4.113.480,00	4.319.155,00	4.535.[illegible]2,00
01.023	Keluarga yang memiliki lansia ikut kelompok kegiatan BKL	1585073	keluarga		3.917.600,00				4.113.480,00	4.319.155,00	4.535.112,00
01.023.001	tanpa suboutput				3.917.600,00				4.113.480,00	4.319.155,00	4.535.112,00
01.023.001.151	Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4,00	buku/media	294.346,00	1.177.384,00	0,00	0,00	0,00	1.236.253,00	1.298.066,00	1.362.969,00
01.023.001.152	Peningkatan Jejaring Kemitraan	3,00	mitra kerja	366.666,67	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	1.212.750,00	1.273.388,00
01.023.001.153	Peningkatan Kualitas PPKS	25,00	PPKS yg ada	21.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	551.250,00	578.813,00	607.753,00
01.023.001.154	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS	34,00	Provinsi	32.800,47	1.115.216,00	0,00	0,00	0,00	1.170.977,00	1.229.526,00	1.291.002,00
	Total				3.917.600,00	-	-	-	4.113.480,00	4.319.155,00	4.535.112,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan		3.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.600,00
01.023	Keluarga yang memiliki lansia ikut kelompok kegiatan BKL		3.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.600,00
01.023.001	tanpa suboutput		3.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.600,00
01.023.001.151	Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Utama	1.177.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.384,00
01.023.001.152	Peningkatan Jejaring Kemitraan	Utama	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
01.023.001.153	Peningkatan Kualitas PPKS	Utama	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.[illegible],00
01.023.001.154	Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS	Utama	1.115.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.216,00
	Total		3.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917.600,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3325 - Kerjasama Pendidikan kependudukan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan		2.789.440,00
01.01	Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan	100%	
	Total		2.789.440,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan*											2.789.440,00
01.014	Mitra kerja yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.789.440,00
01.014.001	tanpa suboutput											2.789.440,00
	071 - Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan											171.812,00
		Pusat	Pusat									171.812,00
	072 - Penyiapan materi pendidikan kependudukan											720.335,00
		Pusat	Pusat									720.335,00
	073 - Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan											459.652,00
		Pusat	Pusat									459.652,00
	074 - Implementasi pendidikan kependudukan (desiminasi/publikasi)											876.899,00
		Pusat	Pusat									876.899,00
	075 - Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan											560.742,00
		Pusat	Pusat									560.742,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
Total												2.789.440,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan				2.789.440,00				2.928.913,00	3.075.357,00	3.229.126,00
01.014	Mitra kerja yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan	3	mitra kerja		2.789.440,00				2.928.913,00	3.075.357,00	3.229.126,00
01.014.001	tanpa suboutput				2.789.440,00				2.928.913,00	3.075.357,00	3.229.126,00
01.014.001.071	Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan	2,00	Dokumen	85.906,00	171.812,00	0,00	0,00	0,00	180.403,00	189.423,00	198.894,00
01.014.001.072	Penyiapan materi pendidikan kependudukan	5,00	buku	144.067,00	720.335,00	0,00	0,00	0,00	756.352,00	794.169,00	833.878,00
01.014.001.073	Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan	3,00	mitra kerja	153.217,33	459.652,00	0,00	0,00	0,00	482.635,00	506.766,00	532.105,00
01.014.001.074	Implementasi pendidikan kependudukan (desiminasi/publikasi)	3,00	kegiatan	292.299,67	876.899,00	0,00	0,00	0,00	920.744,00	966.781,00	1.015.120,00
01.014.001.075	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	34,00	Provinsi	16.492,41	560.742,00	0,00	0,00	0,00	588.779,00	618.218,00	649.129,00
Total					2.789.440,00	-	-	-	2.928.913,00	3.075.357,00	3.229.126,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan		2.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.440,00
01.014	Mitra kerja yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan pendidikan kependudukan		2.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.440,00
01.014.001	tanpa suboutput		2.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.440,00
01.014.001.071	Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan	Utama	171.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.812,00
01.014.001.072	Penyiapan materi pendidikan kependudukan	Utama	720.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.335,00
01.014.001.073	Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan	Utama	459.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.652,00
01.014.001.074	Implementasi pendidikan kependudukan (desiminasi/publikasi)	Utama	876.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.899,00
01.014.001.075	Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Utama	560.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.742,00
Total			2.789.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.440,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nopriyal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3326 - Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota		2.779.320,00
01.01	Persentase Pemda yang memasukkan Indikator program KKBPK ke dalam RKPD	50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota	
	Total		2.779.320,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota*											2.779.320,00
01.009	Stakeholder yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat pusat dan provinsi			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.779.320,00
01.009.001	tanpa suboutput											2.779.320,00
	061 - Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota											586.936,00
		Pusat	Pusat									586.936,00
	062 - Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota											465.520,00
		Pusat	Pusat									465.520,00
	063 - Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota											292.650,00
		Pusat	Pusat									292.650,00
	064 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan daerah											486.386,00
		Pusat	Pusat									486.386,00
	065 - Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk											947.828,00
		Pusat	Pusat									947.828,00
	Total											2.779.320,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota				2.779.320,00				2.918.286,00	3.064.201,00	3.217.411,00	
01.009	Stakeholder yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat pusat dan provinsi	19	stakeholder		2.779.320,00				2.918.286,00	3.064.201,00	3.217.411,00	
01.009.001	tanpa suboutput				2.779.320,00				2.918.286,00	3.064.201,00	3.217.411,00	
01.009.001.061	Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	4,00	dokumen	146.734,00	586.936,00	0,00	0,00	0,00	616.283,00	647.097,00	679.452,00	
01.009.001.062	Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	100,00	kab/kota	4.655,20	465.520,00	0,00	0,00	0,00	488.796,00	513.236,00	53[illegible]8,00	
01.009.001.063	Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	100,00	kab/kota	2.926,50	292.650,00	0,00	0,00	0,00	307.283,00	322.647,00	338.779,00	
01.009.001.064	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan daerah	100,00	kab/kota	4.863,86	486.386,00	0,00	0,00	0,00	510.705,00	536.241,00	563.053,00	
01.009.001.065	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	34,00	Provinsi	27.877,29	947.828,00	0,00	0,00	0,00	995.219,00	1.044.980,00	1.097.229,00	
	Total				2.779.320,00	-	-	-	2.918.286,00	3.064.201,00	3.217.411,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota		2.779.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.320,00
01.009	Stakeholder yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan di tingkat pusat dan provinsi		2.779.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.320,00
01.009.001	tanpa suboutput		2.779.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.320,00
01.009.001.061	Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	Utama	586.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.936,00
01.009.001.062	Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	Utama	465.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.520,00
01.009.001.063	Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota	Utama	292.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.650,00
01.009.001.064	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan daerah	Utama	486.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.386,00
01.009.001.065	Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Utama	947.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.828,00
	Total		2.779.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.320,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

Nopi[illegible]jal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3327 - Pembinaan Standarisasi Kapasitas Tenaga Kesehatan Pelayanan KBKR
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi		3.698.200,00
01.01	Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)	85%	
01.02	Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	66%	
	Total		3.698.200,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi*											3.698.200,00
01.019	Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi di Faskes			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.698.200,00
01.019.001	tanpa suboutput											3.698.200,00
	101 - Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pelayanan KB Jalur Swasta											337.021,00
		Pusat	Pusat									337.021,00
	102 - Peningkatan Kapasitas SDM, serta ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya											1.331.661,00
		Pusat	Pusat									1.331.661,00
	103 - Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pelayanan KB Jalur Swasta											906.826,00
		Pusat	Pusat									906.826,00
	104 - Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta											1.122.692,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat									
	Total											1.122.692,00
												3.698.200,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi				3.698.200,00				3.883.110,10	4.077.265,60	4.281.128,70
01.019	Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi di Faskes	2700	faskes		3.698.200,00				3.883.110,10	4.077.265,60	4.281.128,70
01.019.001	tanpa suboutput				3.698.200,00				3.883.110,10	4.077.265,60	4.281.128,70
01.019.001.101	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pelayanan KB Jalur Swasta	4,00	dokumen	84.255,25	337.021,00	0,00	0,00	0,00	353.872,10	371.565,70	390.143,90
01.019.001.102	Peningkatan Kapasitas SDM, serta ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya	50,00	Faskes	26.633,22	1.331.661,00	0,00	0,00	0,00	1.398.244,10	1.468.156,30	1.541.564,10
01.019.001.103	Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pelayanan KB Jalur Swasta	19,00	Mitra	47.727,68	906.826,00	0,00	0,00	0,00	952.167,30	999.775,70	1.049.764,40
01.019.001.104	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta	34,00	Provinsi	33.020,35	1.122.692,00	0,00	0,00	0,00	1.178.826,60	1.237.767,90	1.299.656,30
	Total				3.698.200,00	-	-	-	3.883.110,10	4.077.265,60	4.281.128,70

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi		3.698.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.200,00
01.019	Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi di Faskes		3.698.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.200,00
01.019.001	tanpa suboutput		3.698.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.200,00
01.019.001.101	Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pelayanan KB Jalur Swasta	Utama	337.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.021,00
01.019.001.102	Peningkatan Kapasitas SDM, serta ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya	Utama	1.331.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.661,00
01.019.001.103	Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pelayanan KB Jalur Swasta	Utama	906.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.826,00
01.019.001.104	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta	Utama	1.122.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.692,00
	Total		3.698.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.200,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP 19601111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3328 - Analisis Dampak Kependudukan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis		2.944.000,00
01.01	Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah	6	
	Total		2.944.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis*											2.944.000,00
01.020	Model solusi strategis dampak kependudukan			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.944.000,00
01.020.001	tanpa suboutput											2.944.000,00
	081 - Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial)											302.975,00
		Pusat	Pusat									302.975,00
	082 - Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan Dampak kependudukan											583.065,00
		Pusat	Pusat									583.065,00
	083 - Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan											1.326.480,00
		Pusat	Pusat									1.326.4 ,00
	084 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak kependudukan											731.480,00
		Pusat	Pusat									731.480,00
	Total											2.944.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis				2.944.000,00				3.091.200,00	3.245.760,00	3.408.048,00
01.020	Model solusi strategis dampak kependudukan	34	model solusi		2.944.000,00				3.091.200,00	3.245.760,00	3.408.048,00
01.020.001	tanpa suboutput				2.944.000,00				3.091.200,00	3.245.760,00	3.408.048,00
01.020.001.081	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial)	2,00	Dokumen	151.487,50	302.975,00	0,00	0,00	0,00	318.123,75	334.029,94	350.731,43
01.020.001.082	Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan Dampak kependudukan	129,00	Mitra	4.519,88	583.065,00	0,00	0,00	0,00	612.218,25	642.829,16	674.970,62
01.020.001.083	Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	6,00	Model	221.080,00	1.326.480,00	0,00	0,00	0,00	1.392.804,00	1.462.444,20	1.535.566,41
01.020.001.084	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak kependudukan	34,00	Provinsi	21.514,12	731.480,00	0,00	0,00	0,00	768.054,00	806.456,70	846.779,54
	Total				2.944.000,00	-	-	-	3.091.200,00	3.245.760,00	3.408.048,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis		2.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00
01.020	Model solusi strategis dampak kependudukan		2.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00
01.020.001	tanpa suboutput		2.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00
01.020.001.081	Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial)	Utama	302.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.975,00
01.020.001.082	Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan Dampak kependudukan	Utama	583.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.065,00
01.020.001.083	Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Utama	1.326.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.480,00
01.020.001.084	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak kependudukan	Utama	731.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.480,00
	Total		2.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3329 - Perencanaan Pengendalian Penduduk
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Perencanaan Pengendalian Pendudukan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan		3.656.080,00
01.01	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan	16 (sektor)	
	Total		3.656.080,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan*											3.656.080,00
01.019	Stakeholder yang memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat pusat dan provinsi			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	3.656.080,00
01.019.001	tanpa suboutput											3.656.080,00
	051 - Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk											650.000,00
		Pusat	Pusat									650.000,00
	052 - Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk											750.000,00
		Pusat	Pusat									750.000,00
	053 - Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan											1.256.080,00
		Pusat	Pusat									1.256.080,00
	054 - Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk											275.000,00
		Pusat	Pusat									275.000,00
	055 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengendalian Penduduk											725.000,00
		Pusat	Pusat									725.000,00
	Total											3.656.080,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)							
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan				3.656.080,00				3.838.884,00	4.030.829,00	4.232.370,00	
01.019	Stakeholder yang memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat pusat dan provinsi	20	stakeholder		3.656.080,00				3.838.884,00	4.030.829,00	4.232.370,00	
01.019.001	tanpa suboutput				3.656.080,00				3.838.884,00	4.030.829,00	4.232.370,00	
01.019.001.051	Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk	1,00	dokumen	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	716.625,00	752.456,00	
01.019.001.052	Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk	3,00	dokumen	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	787.500,00	826.875,00	868.219,00	
01.019.001.053	Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan	171,00	Pemda	7.345,50	1.256.080,00	0,00	0,00	0,00	1.318.884,00	1.384.828,00	1.454.070,00	
01.019.001.054	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk	2,00	mitra	137.500,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	288.750,00	303.188,00	318.347,00	
01.019.001.055	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	34,00	provinsi	21.323,53	725.000,00	0,00	0,00	0,00	761.250,00	799.313,00	839.278,00	
	Total				3.656.080,00	-	-	-	3.838.884,00	4.030.829,00	4.232.370,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan		3.656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.080,00
01.019	Stakeholder yang memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat pusat dan provinsi		3.656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.080,00
01.019.001	tanpa suboutput		3.656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.080,00
01.019.001.051	Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk	Utama	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
01.019.001.052	Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk	Utama	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
01.019.001.053	Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan	Utama	1.256.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.080,00
01.019.001.054	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk	Utama	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
01.019.001.055	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengendalian Penduduk	Utama	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
	Total		3.656.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656.080,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3330 - Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)		17.460.000,00
01.01	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	
	Total		17.460.000,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)*											17.460.000,00
01.023	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	17.460.000,00
01.023.001	tanpa suboutput											17.460.000,00
	211 - Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan STIK											17.460.000,00
		Pusat	Pusat									12.147.521,00
	212 - Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Bank Data											12.147.521,00
		Pusat	Pusat									2.011.400,00
	213 - Penyebarluasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK											2.011.400,00
		Pusat	Pusat									829.872,00
	214 - Peningkatan kompetensi pengelola											829.872,00
		Pusat	Pusat									903.432,00
	215 - Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi											903.432,00
		Pusat	Pusat									1.567.775,00
	Total											1.567.775,00
												17.460.000,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)				17.460.000,00				18.333.001,00	19.249.651,00	20.212.133,00
01.023	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi	4	skala		17.460.000,00				18.333.001,00	19.249.651,00	20.212.133,00
01.023.001	tanpa suboutput				17.460.000,00				18.333.001,00	19.249.651,00	20.212.133,00
01.023.001.211	Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan STIK	3,00	dokumen	4.049.173,67	12.147.521,00	0,00	0,00	0,00	12.754.897,00	13.392.642,00	14.062.274,00
01.023.001.212	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Bank Data	10,00	Aplikasi dan Dokumen	201.140,00	2.011.400,00	0,00	0,00	0,00	2.111.970,00	2.217.569,00	2.328.447,00
01.023.001.213	Penyebarluasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK	2,00	dokumen	414.936,00	829.872,00	0,00	0,00	0,00	871.366,00	914.934,00	960.681,00
01.023.001.214	Peningkatan kompetensi pengelola	1,00	dokumen	903.432,00	903.432,00	0,00	0,00	0,00	948.604,00	996.034,00	1.045.835,00
01.023.001.215	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	1,00	dokumen	1.567.775,00	1.567.775,00	0,00	0,00	0,00	1.646.164,00	1.728.472,00	1.814.896,00
	Total				17.460.000,00	-	-	-	18.333.001,00	19.249.651,00	20.212.133,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)		17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00
01.023	Layanan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi		17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00
01.023.001	tanpa suboutput		17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00
01.023.001.211	Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan STIK	Utama	12.147.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147.521,00
01.023.001.212	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Bank Data	Utama	2.011.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.400,00
01.023.001.213	Penyebarluasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK	Utama	829.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.872,00
01.023.001.214	Peningkatan kompetensi pengelola	Utama	903.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.432,00
01.023.001.215	Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	Utama	1.567.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.775,00
	Total		17.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.000,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrial, SP, MA
NIP. 196011111985031001

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
2. PROGRAM : 06 - Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah
4. KEGIATAN : 3331 - Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Perwakilan BKKBN Provinsi (33 Provinsi)
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah		991.889.982,00
01.01	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	
01.02	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	
01.03	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	33 Prov dan 547 Kab/Kota	
01.04	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80%	
	Total		991.889.982,00

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	*Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah*											991.889.982,00
01.075	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	41.103.843,00
01.075.001	tanpa suboutput											
	221 - Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk											41.103.843,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									2.736.240,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									65.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									70.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									82.111,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									64.769,00
												57.905,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									105.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									79.455,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									75.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									90.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									90.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									55.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									75.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									90.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									75.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									75.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									80.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									90.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									90.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									95.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									75.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									102.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									95.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									95.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									9. .00,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									95.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									80.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									80.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									90.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									90.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									90.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									95.000,00
	222 - Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota											5.453.665,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									213.997,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									247.568,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									192. .0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									125.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									129.807,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									183.511,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									135.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									166.197,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									105.940,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									105.940,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									89.512,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									245.653,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									27[illegible] 138,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									83.912,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									284.224,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									122.112,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									122.398,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									124.455,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									209.968,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									147.684,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									147.684,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									149.741,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									179.054,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									166.768,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									150.311,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									226.425,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									183.226,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									105.655,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									101.540,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									159.425,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									124.455,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									186.169,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									263.196,00
	223 - Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota											5.339.916,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									157.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									187.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									155.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									104.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									101.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									174.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									158.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									143.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									149.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									149.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									96.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									204.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									218.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									132.355,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									226.561,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									152.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									155.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									158.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									182.521,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									140.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									140.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									137.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									194.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									173.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									167.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									188.561,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									174.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									146.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									146.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									181.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									158.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									173.918,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									220.000,00
	224 - Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)											5.713.022,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									226.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									243.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									206.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									197.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1[illegible]000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									228.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									171.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									201.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									156.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									156.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									141.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									261.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									301.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									205.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									328.022,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									161.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									176.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									181.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									241.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									181.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									181.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									176.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									227.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									196.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									186.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									246.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									206.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									151.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									151.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									186.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									171.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									216.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									271.000,00
	225 - Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk											11.828.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									425.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									625.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									519.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									163.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									331.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									437.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									310.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									390.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									142.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									142.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									230.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									820.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									865.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									145.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.052.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									292.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									161.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									400.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									617.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									181.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									416.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									177.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									255.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									185.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									384.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									510.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									405.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									136.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									148.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									179.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									160.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									178.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									448.000,00
	226 - Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk											9.033.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									345.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									460.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									424.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									132.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									276.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									301.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									260.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									315.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									156.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									156.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									200.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									602.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									480.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									150.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									520.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									248.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									154.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									320.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									370.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									144.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									289.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									138.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									210.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									170.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									319.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									390.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									320.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									160 [illegible]0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									136.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									166.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									160.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									172.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									390.000,00
01.076	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	95.428.066,00
01.076.001	tanpa suboutput											95.428.066,00
	230 - Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP											49.308.580,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									616.050,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									2.843.850,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.398.300,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.238.250,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									683.100,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									2.008.950,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									539.250,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									2.402.100,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									316.050,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									571.010,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									1.984.990,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									7.520.760,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									5.986.290,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									719.330,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									6.945.480,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									1.593.850,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									1.148.950,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.467.900,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.133.590,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.046.250,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									358.650,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									429.600,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									825.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									652.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									837.450,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									1.615.650,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									445.650,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									333.900,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									247.650,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									446.530,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									404.720,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									151.070,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									425.060,00
	231 - Pelayanan Pencabutan Implant											
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									6.529.570,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									69.850,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									257.950,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									159.050,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									256.300,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									139.850,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									547.450,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									111.250,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									461.450,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									48.050,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									54.290,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									189.560,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									765.440,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									863.200,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									61.320,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									624.920,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									221.440,00
												32.640,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									223.200,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									184.330,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									108.400,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									34.050,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									46.800,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									83.400,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									121.050,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									84.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									246.600,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									93.450,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									58.850,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									43.250,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									95.380,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									97.540,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									22.060,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									122.700,00
	232 - Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus											8.643.128,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									244.280,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3 [illegible]350,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									245.780,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									194.280,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									194.280,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									277.280,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									192.350,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									241.280,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									188.280,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									227.280,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									101.350,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									565.638,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									50[illegible]150,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									194.780,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									560.280,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									201.350,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									195.280,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									226.280,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									305.280,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									214.280,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	160 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									196.480,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									196.280,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									368.560,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									225.280,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									245.280,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									291.280,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									207.280,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									194.480,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									185.280,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									259.280,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									211.780,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									253.280,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									357.280,00
	233 - Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi											8.267.965,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									244.047,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									335.047,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									226.547,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									209.047,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									202.047,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									261.547,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									191.547,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									271.047,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									191.547,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									216.047,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									104.047,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									559.014,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									440.047,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									195.047,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									475.047,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									230.047,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									195.047,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									216.047,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									237.047,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									219.047,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									191.547,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									191.547,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									383.094,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									230.047,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									223.047,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									327.047,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									209.047,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									189.447,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									188.047,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									223.047,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									219.047,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									223.047,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									251.047,00
	234 - Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota											7.318.512,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									194.355,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									203.075,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									183.405,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									223.175,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									148.965,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									237.235,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									120.155,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									227.705,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									154.265,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									181.935,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									109.115,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									744.085,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									714.482,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									162.545,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									734. .5,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									174.015,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									140.505,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									128.935,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									193.855,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									118.035,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									139.335,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									132.955,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									243.670,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									163.625,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									218.505,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									221.200,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									129.405,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									140.095,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									125.875,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									169.045,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									126.355,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									164.825,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									249.465,00
	235 - Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota											15.360.311,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									625.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									875.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									525.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									350.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									325.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									475.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									300.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									425.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									225.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									225.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									200.[illegible]0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.265.311,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.100.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									215.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.190.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									250.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									275.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									300.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									600.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									400.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									40 000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									375.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									475.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									425.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									375.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									660.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									475.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									200.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									200.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									325.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									30 000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									375.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									630.000,00
01.077	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	89.424.735,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.077.001	tanpa suboutput											89.424.735,00
	240 - Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah											56.380.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.155.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3.405.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									2.955.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.155.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									2.05[illegible]000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.155.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									1.155.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									2.055.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									405.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									405.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									1.015.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									9.255.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									5.655.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									405.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									5.655.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									3.855.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									405.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.605.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									2.505.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									405.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.155.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									405.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									810.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									405.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.155.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									2.955.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									405.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									405.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									405.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									405.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									405.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									405.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									405.000,00
	241 - Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative											8.866.144,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									253.240,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									280.240,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									267.240,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									239.240,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									205.240,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									267.240,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									241.240,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									236.240,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									249.240,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									249.240,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									175.224,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									379.240,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									381.240,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									226.240,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									383.240,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									237.240,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									257.240,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									261.240,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									287.240,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									252.240,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									247.240,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									243.240,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									307.480,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									281.240,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									273.240,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									287.240,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									279.240,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									245.240,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									245.240,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									265.240,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									261.240,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									293.240,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									308.240,00
	244 - Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL											8.213.700,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									256.750,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									251.250,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									246.750,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									221.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									200.750,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									230.250,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									202.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									213.750,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									229.250,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									229.600,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									160.700,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									311.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									342.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									221.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									363.600,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									201.600,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									214.300,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									227.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									272.600,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									247.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									242.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									236.250,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									308.750,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									281.250,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									255.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									288.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									247.250,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									216.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									216.500,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									230.800,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									218.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									286.400,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									301.700,00
	245 - Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK											8.441.891,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									212.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									203.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									193.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									182.500,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									162.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									217.500,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									182.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									182.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									192.500,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									212.500,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									152.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP R 1)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									262.500,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									277.391,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									207.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									287.500,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									182.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									192.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									197.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									212.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									202.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									192.500,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.692.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									275.500,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									222.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									222.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									232.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									222.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									197.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									202.500,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									212.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1 [illegible]500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									232.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									227.500,00
	246 - Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota											7.523.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									285.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									306.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									265.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									210.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									194.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									290.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									178.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									25 [illegible]00,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									130.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									130.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									114.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									336.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									324.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									180.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									355.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									146.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									162.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1[illegible] 000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									282.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									242.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									242.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									226.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									27[illegible].000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									258.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									226.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									306.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									29[illegible] 00,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									114.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									114.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									194.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									178.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									226.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									308.000,00
01.078	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera					006 - Anggaran Kesehatan		tidak	288.598.483,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.076.001	tanpa suboutput											288.598.483,00
	250 - Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB											114.110.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									2.5[illegible]00,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									6.755.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									6.085.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									2.450.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									4.245.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									2.475.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									2.440.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									4.265.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									775.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									775.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									2.300.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									18.12[illegible]00,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									11.565.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									765.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									11.580.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									7.830.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									785.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									3.040.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									4.900.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									810.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									2.460.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									805.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.355.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									815.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									2.455.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									6.110.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									825.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									770.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									770.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									795.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									790.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									805.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									885.000,00
	251 - Penayangan Informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional											26.965.494,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									958.500,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.158.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									878.500,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									733.500,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									713.500,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									846.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									703.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									798.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									643.500,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									643.500,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									613.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.046.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.206.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									606.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.262.800,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									663.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									683.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									703.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									903.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									778.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									778.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									758.500,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.147.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									803.500,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									763.500,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									913.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									843.500,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									623.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									623.500,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									719.771,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									703.500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									766.923,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									976.000,00
	252 - Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen											6.840.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									280.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									380.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									240.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									170.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									160.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									220.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									150.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									200.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									120.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									120.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									110.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									320.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									400.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									100.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									430.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									130.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									140.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									150.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									270.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									190.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									190.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									180.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									250.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									200.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									180.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									290.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									220.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									110.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									110.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									160.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									150.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									180.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									340.000,00
	253 - Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah											0,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									0,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									0,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									0,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									0,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									0,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									0,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									0,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00
	254 - Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat											0,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									0,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									0,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									0,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									0,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									0,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									0,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									0,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00
	255 - Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan											16.437.700,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									439.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									523.500,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									499.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									447.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									411.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									545.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									411.900,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									543.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									329.400,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									342.700,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									204.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									736.600,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									784.700,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									366.800,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									780.800,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									373.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									306.900,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									412.800,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									753.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									511.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									434.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									459.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									501.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									507.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									49[illegible].000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									654.600,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									612.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									340.400,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									303.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									446.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									406.800,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									757.500,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									804.800,00
	256 - Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK											23.540.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									850.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.050.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									770.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									630.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									610.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									730.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									590.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									690.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									530.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									530.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									510.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									930.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.090.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									490.000,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.150.000,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									550.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									570.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									590.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									830.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									670.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									670.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									650.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.080.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									690.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									1.891.366,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									12.404.262,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									9.621.770,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									1.379.641,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									10.746.231,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									2.655.774,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									1.577.411,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									2.069.079,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									2.506.896,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.290.641,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.081.194,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.478.268,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									2.093.659,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.245.093,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.578.320,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									3.074.024,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.189.904,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									733.956,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									731.409,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									1.734.728,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.085.445,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									1.033.541,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.659.899,00
	258 - Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga											17.421.440,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									548.080,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									656.080,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									468.880,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									457.360,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									543.040,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									509.200,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									908.640,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									503.440,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									373.840,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									387.520,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									371.680,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									792.880,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									752.560,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									396.160,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									818.800,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (PP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									451.600,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									381.040,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									423.520,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									557.440,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									465.280,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									442.960,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									450.160,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									824.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									560.240,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									464.560,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									561.040,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									492.640,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									450.880,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									439.360,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									425.680,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									472.080,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									535.440,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									535.360,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.080	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	006 - Anggaran Kesehatan		tidak	383.147.746,00
01.080.001	Tanpa Suboutput											
	236 - Jaminan Ketersediaan Alokon											383.147.746,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									383.147.746,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									3.101.430,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									12.191.774,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									8.327.174,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									4.112.118,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									7.598.324,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									24.514.877,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									6.830.116,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									66.817.303,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									2.035.038,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.409.911,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									62.641.369,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									47.567.619,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									1.214.063,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									12.380.439,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									19.445.951,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.642.776,00
												19.612.344,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									12.880.242,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									8.703.981,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									4.299.270,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									3.376.168,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.173.481,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									5.729.846,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									3.439.487,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									14.309.366,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									11.978.104,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									4.165.723,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									2.415.430,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									184.559,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									3.963.067,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									3.974.237,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.112.159,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.081	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK			Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Percepatan penurunan stunting	Peningkatan pendidikan gizi	003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		tidak	30.577.000,00
01.081.001	Tanpa Sub Output											
	247 - Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta											30.577.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									30.577.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.265.000,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.320.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.140.000,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									720.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									660.000,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									935.000,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									600.000,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									900.000,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									525.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									525.000,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									360.000,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									1.620.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									1.662.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									350.000,00
												1.702.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									520.000,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									502.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									800.000,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.100.000,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									910.000,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									840.000,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									845.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.200.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.050.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									910.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									1.440.000,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.190.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									480.000,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									480.000,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									880.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									800.000,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									1.040.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.305.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.084	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB			Membangun Indonesia Dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit	Peningkatan kualitas lingkungan sehat	006 - Anggaran Kesehatan		tidak	0,00
01.084.001	Tanpa Sub Output											
	259 - Pembinaan Kampung KB											0,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									0,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									0,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									0,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									0,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									0,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									0,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									0,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									0,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									0,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									0,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									0,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									0,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									0,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									0,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									0,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									0,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									0,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									0,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									0,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									0,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									0,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									0,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									0,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									0,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									0,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									0,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									0,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									0,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									0,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									0,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									0,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01.085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan 008 - Upaya Konvergensi Penanganan Stunting		tidak	59.095.109,00
01.085.001	tanpa suboutput											59.095.109,00
	242 - Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota											41.395.109,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									1.445.063,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									1.872.988,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									1.276.036,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									1.039.042,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									1.026.199,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									1.324.840,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									1.023.090,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									1.184.380,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									900.486,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									900.225,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									787.645,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									1.970.238,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									2.138.313,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									914.892,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									2.252.703,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									941.672,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									969.645,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									1.031.423,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									1.482.797,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									1.110.580,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									1.105.819,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									1.095.106,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									1.549.812,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									1.212.948,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									1.119.507,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									1.618.256,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									1.273.655,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									916.320,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									907.393,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									1.102.009,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									1.003.569,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									1.180.333,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									1.718.125,00
	243 - Pembinaan Kelompok BKR											17.700.000,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									619.313,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									802.709,00
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									546.873,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									441.018,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									438.467,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									567.788,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									438.467,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									507.592,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									385.923,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									384.953,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									328.992,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									844.388,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									916.420,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									383.525,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									965.444,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									403.574,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									415.562,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									442.038,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									635.484,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									475.963,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									473.922,00
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									469.331,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									664.205,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									519.835,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									479.789,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									693.538,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									545.852,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									384.137,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									380.311,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									472.290,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									430.101,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									505.857,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									736.339,00
01.086	Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan			Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	003 - Anggaran Responsif Gender 006 - Anggaran Kesehatan		tidak	4.515.000,00
01.086.001	Tanpa suboutput											
	260 - Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan											4.515.000,00
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh									4.515.000,00
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara									141.250,00
												173.750,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat									133.000,00
		Provinsi Riau	Provinsi Riau									108.500,00
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi									105.000,00
		Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan									134.500,00
		Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu									116.500,00
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung									126.500,00
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung									115.500,00
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau									119.000,00
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta									102.500,00
		Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									249.400,00
		Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah									238.000,00
		Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta									112.500,00
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur									246.100,00
		Provinsi Banten	Provinsi Banten									114.500,00
		Provinsi Bali	Provinsi Bali									111.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat									126.500,00
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur									143.500,00
		Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat									115.500,00
		Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah									115.500,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan									112.000,00
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur									208.000,00
		Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara									119.000,00
		Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah									112.000,00
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan									162.500,00
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara									126.000,00
		Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo									108.500,00
		Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat									105.500,00
		Provinsi Maluku	Provinsi Maluku									116.000,00
		Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara									116.500,00
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat									112.000,00
		Provinsi Papua	Provinsi Papua									168.000,00
				Total								991.889.982,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah				991.889.982,00				1.060.789.427,00	1.114.809.131,00	1.169.510.006,00
01.075	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	514	wilayah		41.103.843,00				43.159.036,00	45.317.025,00	47.582.845,00
01.075.001	tanpa suboutput				41.103.843,00				43.159.036,00	45.317.025,00	47.582.845,00
01.075.001.221	Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk	0,00	stakeholder	NaN	2.736.240,00	0,00	0,00	0,00	2.873.052,00	3.016.712,00	3.167.537,00
01.075.001.222	Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota	0,00	profil penduduk	NaN	5.453.665,00	0,00	0,00	0,00	5.726.349,00	6.012.670,00	6.313.299,00
01.075.001.223	Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota	0,00	model solusi	NaN	5.339.916,00	0,00	0,00	0,00	5.606.912,00	5.887.264,00	6.181.622,00
01.075.001.224	Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	0,00	mitra kerja	NaN	6.713.022,00	0,00	0,00	0,00	7.048.673,00	7.401.116,00	7.771.163,00
01.075.001.225	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk	1.542,00	stakeholder	7.670,56	11.828.000,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	12.419.400,00	13.040.378,00	13.692.394,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01.075.001.226	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	0,00	kegiatan	NaN	9.033.000,00	0,00	0,00	0,00	9.484.650,00	9.958.885,00	10.456.830,00
01.076	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	30108272	peserta KB		95.428.066,00				100.199.482,00	105.209.453,00	110.469.914,00
01.076.001	tanpa suboutput				95.428.066,00				100.199.482,00	105.209.453,00	110.469.914,00
01.076.001.230	Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP	0,00	Peserta KB	NaN	49.308.580,00	0,00	0,00	0,00	51.774.020,00	54.362.711,00	57.080.844,00
01.076.001.231	Pelayanan Pencabutan Implant	0,00	peserta KB	NaN	6.529.570,00	0,00	0,00	0,00	6.856.056,00	7.198.855,00	7.558.792,00
01.076.001.232	Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	0,00	penduduk miskin	NaN	8.643.128,00	0,00	0,00	0,00	9.075.287,00	9.529.046,00	10.005.501,00
01.076.001.233	Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi	0,00	faskes	NaN	8.267.965,00	0,00	0,00	0,00	8.681.353,00	9.115.430,00	9.571.203,00
01.076.001.234	Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	0,00	PUS	NaN	7.318.512,00	0,00	0,00	0,00	7.684.439,00	8.068.660,00	8.472.090,00
01.076.001.235	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota	0,00	wilayah	NaN	15.360.311,00	0,00	0,00	0,00	16.128.327,00	16.934.751,00	17.781.484,00
01.077	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah	514	wilayah		89.424.735,00				93.949.629,00	98.637.310,00	103.569.159,00
01.077.001	tanpa suboutput				89.424.735,00				93.949.629,00	98.637.310,00	103.569.159,00
01.077.001.240	Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	0,00	wilayah	NaN	56.380.000,00	0,00	0,00	0,00	59.199.000,00	62.158.934,00	65.266.885,00
01.077.001.241	Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic integrative	0,00	Kelompok BKB	NaN	8.866.144,00	0,00	0,00	0,00	9.309.451,00	9.774.922,00	10.263.663,00
01.077.001.244	Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL	0,00	Kelomppok BKL	NaN	8.213.700,00	0,00	0,00	0,00	8.624.391,00	9.055.606,00	9.508.384,00
01.077.001.245	Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK	0,00	Kelompok UPPKS	NaN	8.441.891,00	0,00	0,00	0,00	8.863.985,00	9.307.172,00	9.772.526,00
01.077.001.246	Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota	0,00	wilayah	NaN	7.523.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.802,00	8.340.676,00	8.757.701,00
01.078	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK	514	wilayah		288.598.483,00				322.279.712,00	338.393.711,00	355.313.383,00
01.078.001	tanpa suboutput				288.598.483,00				322.279.712,00	338.393.711,00	355.313.383,00
01.078.001.250	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB	0,00	wilayah	NaN	114.110.000,00	0,00	0,00	0,00	119.815.500,00	125.806.285,00	132.096.590,00
01.078.001.251	Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	650,00	media	41.485,38	26.965.494,00	0,00	0,00	0,00	28.313.769,00	29.729.461,00	31.215.933,00
01.078.001.252	Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen	0,00	wilayah	NaN	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.182.000,00	7.541.100,00	7.918.161,00
01.078.001.253	Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah	0,00	gerak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414.752,00	13.035.482,00	13.687.256,00
01.078.001.254	Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	0,00	wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.552,00	7.178.379,00	7.537.296,00
01.078.001.255	Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan	0,00	wilayah	NaN	16.437.700,00	0,00	0,00	0,00	17.259.585,00	18.122.574,00	19.028.695,00
01.078.001.256	Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	1.300,00	mitra kerja	18.107,69	23.540.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	24.717.000,00	25.952.850,00	27.250.491,00
01.078.001.257	Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	0,00	sub sistem	NaN	83.283.849,00	0,00	0,00	0,00	87.448.042,00	91.820.443,00	96.411.467,00
01.078.001.258	Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga	0,00	skala	NaN	17.421.440,00	0,00	0,00	0,00	18.292.512,00	19.207.137,00	20.167.494,00
01.080	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes	19427	Faskes		383.147.746,00				402.305.134,00	422.420.389,00	443.541.409,00
01.080.001	Tanpa Suboutput				383.147.746,00				402.305.134,00	422.420.389,00	443.541.409,00
01.080.001.236	Jaminan Ketersediaan Alokon				383.147.746,00	0,00	0,00	0,00	402.305.134,00	422.420.389,00	443.541.409,00
01.081	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	16.093,00		23.808,35	30.577.000,00				32.105.850,00	33.711.139,00	35.396.690,00
01.081.001	Tanpa Sub Output	3657166	keluarga		30.577.000,00				32.105.850,00	33.711.139,00	35.396.690,00
01.081.001.247	Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta				30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	32.105.850,00	33.711.139,00	35.396.690,00
01.084	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB	2.831.614,00	keluarga	10,80	0,00				0,00	0,00	0,00
01.084.001	Tanpa Sub Output	6726	desa sangat tertinggal		0,00				0,00	0,00	0,00
01.084.001.259	Pembinaan Kampung KB	0,00	Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01.085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu	29327	Kelompok		59.095.109,00				62.049.835,00	65.152.327,00	68.409.941,00
01.085.001	tanpa suboutput				59.095.109,00				62.049.835,00	65.152.327,00	68.409.941,00
01.085.001.242	Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota	10.633,00	Kelompok	3.893,08	41.395.109,00	0,00	0,00	0,00	43.464.851,00	45.638.091,00	47.919.995,00
01.085.001.243	Pembinaan Kelompok BKR	18.694,00	Kelompok	946,83	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	18.584.984,00	19.514.236,00	20.489.946,00
01.086	Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	66267	Kelompok		4.515.000,00				4.740.749,00	5.967.777,00	5.226.665,00
01.086.001	Tanpa suboutput				4.515.000,00				4.740.749,00	5.967.777,00	5.226.665,00
01.086.001.260	Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan	65.270,00	Kelompok	69,17	4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	4.740.749,00	5.967.777,00	5.226.665,00
	Total				991.889.982,00	-	-	-	1.060.789.427,00	1.114.809.131,00	1.169.510.006,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah		991.889.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.889.982,00
01.075	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		41.103.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103.843,00
01.075.001	tanpa suboutput		41.103.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103.843,00
01.075.001.221	Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk	Utama	2.736.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.240,00
01.075.001.222	Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota	Utama	5.453.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453.665,00
01.075.001.223	Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota	Utama	5.339.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.916,00
01.075.001.224	Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	Utama	6.713.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.022,00
01.075.001.225	Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk	Utama	11.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.828.000,00
01.075.001.226	Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	Utama	9.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033.000,00
01.076	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan		95.428.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428.066,00
01.076.001	tanpa suboutput		95.428.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.428.066,00
01.076.001.230	Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP	Utama	49.308.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308.580,00
01.076.001.231	Pelayanan Pencabutan Implant	Utama	6.529.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529.570,00
01.076.001.232	Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	Utama	8.643.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643.128,00
01.076.001.233	Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi	Utama	8.267.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267.965,00
01.076.001.234	Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	Utama	7.318.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318.512,00
01.076.001.235	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota	Utama	15.360.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360.311,00
01.077	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah		89.424.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424.735,00
01.077.001	tanpa suboutput		89.424.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.424.735,00
01.077.001.240	Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	Utama	56.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.380.000,00
01.077.001.241	Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative	Utama	8.866.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866.144,00
01.077.001.244	Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL	Utama	8.213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213.700,00
01.077.001.245	Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK	Utama	8.441.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.891,00
01.077.001.246	Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota	Utama	7.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523.000,00
01.078	Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK		288.598.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598.483,00

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.078.001	tanpa suboutput		288.598.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598.483,00
01.078.001.250	Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB	Utama	114.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.110.000,00
01.078.001.251	Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	Utama	26.965.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965.494,00
01.078.001.252	Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen	Utama	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00
01.078.001.253	Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.078.001.254	Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.078.001.255	Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan	Utama	16.437.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437.700,00
01.078.001.256	Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	Utama	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540.000,00
01.078.001.257	Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	Utama	83.283.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.283.849,00
01.078.001.258	Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga	Utama	17.421.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421.440,00
01.080	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes		383.147.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.147.746,00
01.080.001	Tanpa Suboutput		383.147.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.147.746,00
01.080.001.236	Jaminan Ketersediaan Alokon	Pendukung	383.147.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.147.746,00
01.081	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK		30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577.000,00
01.081.001	Tanpa Sub Output		30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577.000,00
01.081.001.247	Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta	Utama	30.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.577.000,00
01.084	Peningkatan Pembinaan Program KKBPK bagi POKJA Kampung KB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.084.001	Tanpa Sub Output		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.084.001.259	Pembinaan Kampung KB	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.085	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu		59.095.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.095.109,00
01.085.001	tanpa suboutput		59.095.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.095.109,00
01.085.001.242	Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Utama	41.395.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395.109,00
01.085.001.243	Pembinaan Kelompok BKR	Utama	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
01.086	Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan		4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.000,00
01.086.001	Tanpa suboutput		4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.000,00
01.086.001.260	Peningkatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok Kegiatan	Utama	4.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515.000,00
	Total		991.889.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.889.982,00

Jakarta, 28 Desember 2018
Sekretaris Utama

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
BkkbN

Nofrijal, SP, MA
NIP. 19601111985031001